



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2023**

MANADO, MARET 2022

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	12
1.3 Maksud dan Tujuan .....	14
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA tahun 2021</b>	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2021 dan Capaian Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BADAN PENDAPATAN DAERAH ...	60
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	66
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	73
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.....	81
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	82
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	82
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.....	84
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 tahun maju 2023.....	99
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH</b>	105
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	121

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA 2021-2026) setiap tahunnya sebagai tolok ukur dan sinkronisasi Tugas Pokok dan Fungsi yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam Visi dan Misi Daerah melalui RPJMD 2021-2026.

Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini disusun sebagai alat ukur yang selanjutnya akan dievaluasi setiap triwulan dalam rentang waktu satu tahun sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tetap terkendali dan terukur tingkat keberhasilannya sesuai yang ditetapkan dalam indikator kinerja tahunan.

Kiranya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini benar-benar dapat dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 bahkan memotivasi segenap jajaran diingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai penerimaan daerah pada akhir periode Tahun 2023.

Manado, Maret 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**OLVIE ATTENG, SE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19621010 198603 2 028**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan, sehingga BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara sebagai unit pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban program dan kegiatan hendaknya sejalan dengan arah dan kebijakan umum daerah dan nasional. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan. Pemberian Otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi,

- misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program BADAN PENDAPATAN DAERAH , lintas BADAN PENDAPATAN DAERAH , program kewilayahan disertai dengan rancana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana kerja pembangunan daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH) Tahun 2023 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rumusan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan kerja perangkat daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk rencana kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pertanggungjawaban, maka BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Penjabaran pedoman penyusunan Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH sesuai dengan amanat Kepmen Nomor 050-3807 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang Keuangan Daerah pada sub bidang Pendapatan dan penerimaan Daerah.

Sebagai implemetasi pelaksanaan penyelarasan anggaran dalam pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi **issue** yang dihadapi oleh setiap pemerintahan daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapisitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Sulawesi Utara harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1), dan telah dirubah kedalam PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi

karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya *open list* menjadi *close list*, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat melakukan pembatalan Peraturan Daerah karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan tidak diatur dalam peraturan perundangan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2). Apabila Pemerintah Daerah membuat suatu produk hukum khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melanggar ketentuan peraturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan memberikan sanksi diantaranya :

1. Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Ranperda menjadi Perda berupa sanksi penundaan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan bagi daerah yang tidak memperoleh DAU sebesar 10% setiap penyaluran;
2. Pelanggaran Perda terhadap larangan pemungutan PDRD berdasarkan Perda yang dibatalkan berupa pemotongan DAU dan atau DBH Pajak Penghasilan sebesar perkiraan penerimaan PDRD yang telah dipungut berdasarkan Perda yang dibatalkan untuk setiap periode penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan. Apabila belum tercantum dalam RAPBD maka sanksi sebesar 5% setiap penyaluran DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

#### **A. Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan

- Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terkait dengan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB telah diterbitkan Perpres nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang pembebanan anggaran dalam pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembagian pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar Pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan;
- b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah.

## B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum yang merupakan kewenangan Provinsi meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan, Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Base Transmitter Cellular (BTS);
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Provinsi meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Parkir di Kawasan Terminal tipe B, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Kawasan Pariwisata, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Pemanfaatan/Pemakaian Ruang Laut di bawah 12 Mil, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi IMTA.

### **C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

### **D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Hibah, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal kewenangan pemungutan retribusi mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber pendapatan pemerintah daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. memperlihatkan kontribusi dari tiap sumber pendapatan tersebut. Jumlah realisasi PAD pemerintah daerah pada akhir periode tahun 2015 sebesar Rp.1.012.692.676.656.-. Memasuki periode pemerintahan 2016-2021 memperlihatkan penurunan pada Tahun awal 2016 yaitu Rp. 981.044.550.486.- . Pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1.146.674.827.814.- . Pada tahun 2018 PAD mencapai Rp. 1.265.411.779.622.- dan tahun 2019 meningkat mencapai Rp. 1.290.305.641.344.- Namun pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp. 1.125.317.513.015.- (94,04%) (Masa Pandemi COVID-19 awal). Masih diperhadapkan dengan kondisi Pandemi COVID-19 untuk Tahun 2021 ditargetkan PAD sebesar Rp. 1.413.292.259.344.- Demikian juga untuk Pajak daerah pada akhir Tahun 2015 ada pada posisi Rp. 836.969.180.599. Memasuki Periode RPJMD 2016-2021, komponen Pajak Daerah terealisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 838.345.626.536.-, Tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 983.887.128.197.-, di Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.069.113.920.172.- selanjutnya di Tahun 2019 menurun menjadi Rp. 1.054.393.634.515.-, di tahun 2020 pada kondisi Pandemi COVID-19 realisasi menurun menjadi Rp. 930.415.146.643.- (91,99%)

Retribusi daerah pada akhir periode 2015 terealisasi sebesar Rp. 54.026.351.326. Memasuki Periode 5 Tahun (2016-2021) dapat dilihat capaian realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp. 65.142.012.463.-, meningkat di Tahun 2017 sebesar Rp. 75.742.955.085.-, Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 80.506.911.359.-, dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 102.625.103.212.-, selanjutnya Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 114.783.974.029.- (107,48%).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah di Tahun 2021-2026 diperlukan perencanaan 5 Tahun ke depan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan setiap tahun di susun Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPd), rancangan rencana strategis (Renstra) BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target rancangan Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2021-2026, dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang bersangkutan, Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH 2023 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan kerja perangkat daerah, renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK BADAN PENDAPATAN DAERAH );
2. Renja merupakan acuan BADAN PENDAPATAN DAERAH untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023;
3. Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RK BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah , Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3807 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara ( Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara adalah agar tersedianya dokumen perencanaan kerja perangkat daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH ) yang berisikan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasional badan sebagai koordinator dalam pemungutan pendapatan daerah;
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara agar dengan adanya dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH , maka target-target peningkatan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat serta pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak dapat terwujud

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2021 dan Capaian Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan, permasalahan yang dihadapi BADAN PENDAPATAN DAERAH dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH yang di dasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kerja Perangkat Daerah (DPA- BADAN PENDAPATAN DAERAH ) tahun berjalan 2022.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun program kegiatan. BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari BADAN

PENDAPATAN DAERAH di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungi serta tata kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BADAN PENDAPATAN DAERAH sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 9 (sembilan) agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2021-2026.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel T-C.29.** tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (Terlampir).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH (BADAN PENDAPATAN DAERAH ) sebagai pengelola pendapatan daerah, maka Rencana Kinerja Tahun 2021 terfokus pada koordinasi pencapaian Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2021 (Induk) sebesar **Rp. 4.072.305.545.344,-** dan Perubahan sebesar **Rp. 4.097.037.788.188,-**terjadi KENAIKAN target disebabkan karena pada terjadi peningkatan target pendapatan dari sumber penerimaan Rertibusi Daerah (JKN), dan lebih khusus lagi untuk pemungutan dan pengelolaan PAD BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara ditargetkan pada Induk sebesar **Rp. 1.413.292.261.344,-**. Kemudian target pada perubahan menjadi **Rp. 1.482.145.602.188,-** dengan Realisasi Sebesar **Rp. 1.310.528.740.581.-(88,43%)**.

Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2021 terukur jelas dengan capaian Realisasi PATDA sebesar Rp. 3.958.016.296.497,- dari target APBD perubahan sebesar Rp. 4.097.037.778.188,- atau sebesar 96,61% dan bila dibandingkan dengan terhadap target APBD Induk 2021 yaitu sebesar Rp.

4.072.305.545.344,- (97,19%) terdapat kenaikan sebesar Rp. 24.732.242.844,- (0,58%), realisasi PATDA lebih besar dari tahun sebelumnya 2020 dikarenakan, peningkatan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

### **Capaian Realisasi Penerimaan terhadap Target Pendapatan Daerah (PATDA) Tahun Anggaran 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.413.292.261.344	1.482.045.602.188	1.310.528.740.581	92,72	88,43
DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.639.013.284.000	2.594.992.186.000	2.626.382.357.008	99,52	101,21
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	20.000.000.000	20.000.000.000	21.105.198.908	105,53	105,53
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.072.305.545.344</b>	<b>4.097.037.788.188</b>	<b>3.958.016.296.497</b>	<b>97,19</b>	<b>96,61</b>

Sumber: Bapenda Prov. Sulut 2022

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selang Periode Tahun 2021 dinilai belum mencapai sasarannya karena tidak tercapai 100%, hal ini dibuktikan dari pencapaian Realisasi terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

### **Target dan Realisasi PAD Tahun 2021**

<b>JENIS PAD</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
<b>PAJAK DAERAH</b>	1.123.928.911.759	1.154.428.911.759	<b>1.075.924.577.041</b>	95,72	93,20
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	16.850.495.000	196.253.926.487	<b>113.645.575.018</b>	674,43	57,91
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	50.838.250.000	50.838.250.000	<b>51.195.170.272</b>	100,70	100,70
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	221.674.604.585	80.524.513.942	<b>69.763.418.250</b>	31,47	86,64
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.413.292.261.344</b>	<b>1.482.045.602.188</b>	<b>1.310.528.740.581</b>	<b>92,72</b>	<b>88,43</b>

Sumber: Bapenda Prov. Sulut 2021

#### b. Dana Transfer

Dana Transfer/Perimbangan diperoleh dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Target dan Realisasi Dana Perimbangan untuk Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

#### **Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021**

<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.639.013.284.000	2.594.992.186.000	<b>2.626.382.357.008</b>	99,52	101,21
- <b>Dana Perimbangan</b>	2.585.484.063.000	2.541.462.965.000	<b>2.572.853.136.008</b>	99,51	101,24
- <b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	53.529.221.000	53.529.221.000	53.529.221.000	100,00	100,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.639.013.284.000	2.594.992.186.000	<b>2.626.382.357.008</b>	99,52	101,21

Sumber: Bapenda Prov. Sulut 2022

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah (PATDA) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah (PATDA) yang Sah untuk Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

#### **Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	20.000.000.000	20.000.000.000	21.105.198.908	105,53	105,53
<b>PENDAPATAN LAINNYA</b>	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>21.105.198.908</b>	<b>105,53</b>	<b>105,53</b>

Sumber: Bapenda Prov. Sulut 2022

#### **Tabel Realisasi PAD yang dikelola oleh Bapenda Tahun Anggaran 2021**

<b>JENIS PAD</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/BERKURANG</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TARGET INDUK</b>	<b>TARGET PERUBAHAN</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>+/- (Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
<b>PAJAK DAERAH</b>	1.123.928.911.759	1.154.428.911.759	30.500.000.000	<b>1.079.263.376.010</b>	96,03	93,49
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	33.040.000	33.040.000	0	<b>19.000.000</b>	57,50	57,51
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	16.451.960.000	16.451.960.000	0	<b>15.072.919.164</b>	91,62	91,62
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.140.413.911.759</b>	<b>1.170.913.911.759</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>1.094.355.295.174</b>	95,96	93,46

Sumber: Bapenda Prov. Sulut 2022

## **Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang belum jelas mengenai pajak alat berat, merupakan kendala bagi aparatur penagih pajak untuk memungut pajak alat berat terhadap wajib pajak.
- b. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang terkadang terhambat dipenuhi kepada Pemerintah Daerah, apalagi terkait dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, serta realisasi pajak rokok lebih kecil dari target.
- c. Belum memadainya jumlah personil pada UPTD-PPD pembantu serta belum ada keseragaman pemahaman pegawai mengenai pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, terutama disaat masyarakat diperhadapkan dengan dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penerimaan pendapatan masyarakat menurun sehingga kecenderungan pengalihan pembiayaan dialihkan untuk kebutuhan perlindungan kesehatan.
- e. Relatif masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang menghindari kewajiban pajak daerah/retribusi daerah.
- f. Belum berjalan dengan baik koordinasi antar instansi terkait dan juga pemerintah kabupaten/kota dalam mensuport upaya optimalisasi PAD.

## **2. Solusi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berikut ini beberapa **Solusi** sebagai langkah antisipatif yang ditempuh untuk Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah baik Pajak daerah dan Retribusi Daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) yaitu:

1. **Digitalisasi dengan membentuk TP2DD (Tim Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota).**
2. **Kerjasama Optimalisasi PAD melalui peningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka Sosialisasi dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
3. **Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menyusun Probis (Proses Bisnis), SOP, Renaksi Pengelolaan Pendapatan Daerah.**
4. **Pembentukan UPTD-UPTD yang Baru dalam rangka Optimalisasi Administrasi Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Boltim, Bolmut, Bolsel, Sitaro dan Talaud).**
5. **Integrasi Data Kendaraan Bermotor dengan Kepolisian, Dukcapil dan lembaga lainnya.**
6. **Melengkapi sarana dan Prasarana/fasilitas pelayanan termasuk menyeragamkan *Prototipe SAMSAT*, menyederhanakan system dan prosedur pelayanan PENGELOLAAN PENDAPATAN BERBASIS ELEKTRONIK.**
7. **Menintensifkan Pelatihan/ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pendataan, penetapan, perhitungan, penagihan, dan monev) dengan berpedoman pada peraturan perpajakan dan retribusi yang berlaku serta prinsip-prinsip pelayanan prima.**
8. **Melaksanakan Rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan untuk optimalisasi Pendapatan Daerah.**
9. **Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Instansi teknis daerah (perangkat Daerah), lembaga terkait**

**lainnya (Kantor Pajak Sulutenggo, PT. Bank Sulut-Go , Kepolisian , Jasa Rahardja, Lembaga Perbankan lainnya) guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta upaya untuk menjaring para Penunggak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemanfaatan DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak.**

- 10. Mengembangkan fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui MODERN CHANNEL (PAYMENT POINT di Alfa Mart, Indomart, Kantor pos, Pegadaian, Tokopedia, dll).**
- 11. Mempercepat penambahan/pemekaran Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten/Kota yang potensial.**
- 12. Melakukan penyesuaian Tarif Retribusi yang diatur melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.**

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan pencapaian Target Kinerja Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di daerah;
2. Meningkatnya investasi di daerah antara lain sebagai dampak dari adanya kegiatan *meetings, incentives, convention and exhibition* baik yang berskala nasional, regional dan internasional yang dilaksanakan di daerah nyiur malambai;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat dan tersedianya fasilitas kredit lunak dari lembaga keuangan;
4. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan unit/instansi terkait (BADAN PENDAPATAN DAERAH , Kepolisian dan PT. Jasa Raharja) dalam hal pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Tersedianya fasilitas keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
6. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan dari seluruh pegawai;

7. Tersedianya Produk Hukum yang menunjang peningkatan pelayanan dan pendapatan;
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
9. Komitmen dan motivasi pimpinan daerah untuk memacu peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan dan pendekatan pelayanan kepada wajib pajak;
10. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang kenaikan tarif nilai jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun anggaran selanjutnya, maka beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diperhatikan untuk dilaksanakan, antara lain:

1. Tambahan alokasi anggaran untuk belanja modal, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan pelayanan publik yang kesemuanya ini erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat setiap tahun;
2. Mengintensifkan program/kegiatan peningkatan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pendapatan daerah seperti diklat pajak daerah, diklat perhitungan/penetapan pajak daerah, diklat pengelolaan keuangan daerah, kursus pengawasan internal dll;
3. Pengembangan sistem pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi;
4. Kursus penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penanganan penyalagunaan pajak daerah dan sengketa pajak;
5. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
6. Memperbesar alokasi anggaran untuk program / kegiatan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan dan pemungutan langsung obyek pajak dan wajib pajak / penunggak pajak daerah, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten / kota dan pihak terkait lainnya;

7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah sebagai Implikasi terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana terdapat pembagian Urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dan ke Pemerintah.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH, maka pelaksanaan program dan kegiatan renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2021 TIDAK TERCAPAI REALISASI 100% target Pendapatan Daerah APBD Provinsi Sulawesi Utara, Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Daerah yang dipungut oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi, sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun 2021 masih terkendala dengan deficit keuangan daerah.

BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara dalam Tahun 2021 telah melaksanakan 3 (TIGA) Program dengan 10 (SEPULUH) Kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan Anggaran yang dialokasikan,

Secara ringkasan alokasi dan realisasi anggaran untuk Tahun 2021 dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021 Total Belanja Rp. 82.965.510.194.- , realisasi sebesar Rp. 77.151.146.841,- (92,99%), yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 28.635.260.027,- telah direalisasikan sebesar Rp. 26.963.106.429,- atau mencapai (94,16%), Belanja Tidak Langsung Rp. 54.330.250.167;- dengan realisasi sebesar Rp. 50.188.040.412.- atau (92,38%). Secara Total Realisasi Belanja Tahun 2021, yang terdiri dengan uraian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikelola oleh Bapenda dan 10 UPTD seperti pada tabel laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan per 31 Desember 2021 di halaman berikut:

Tabel . REKAP LAPORAN KOMPILASI REALISASI BELANJA PER UPTD S/D BULAN DESEMBER 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA	PAGU PERUBAHAN 2021	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7=(4 -5)
1	KANTOR PUSAT	BTL + BL	68.470.361.849,00	63.380.250.788,00	92,57	5.090.111.061,00
		BTL	54.330.250.167,00	50.188.040.412,00	92,38	4.142.209.755,00
		BL	14.140.111.682,00	13.192.210.376,00	93,30	947.901.306,00
2	UPTD MANADO	BL	2.809.968.303,00	2.725.149.709,00	96,98	84.818.594,00
3	UPTD MINAHASA	BL	1.266.404.970,00	1.229.637.132,00	97,10	36.767.838,00
4	UPTD BITUNG	BL	1.189.862.239,00	1.176.526.744,00	98,88	13.335.495,00
5	UPTD STS	BL	1.373.678.339,00	1.320.654.369,00	96,14	53.023.970,00
6	UPTD KOTAMOBAGU BOLSEL	BL	1.677.797.673,00	1.521.879.744,00	90,71	155.917.929,00
7	UPTD MINUT	BL	1.319.674.998,00	1.302.093.288,00	98,67	17.581.710,00
8	UPTD TOMOHON	BL	1.071.599.664,00	1.063.331.304,00	99,23	8.268.360,00
9	UPTD MINSEL	BL	1.290.596.648,00	1.261.656.589,00	97,76	28.940.059,00
10	UPTD MITRA	BL	869.374.006,00	836.558.520,00	96,23	32.815.486,00
11	UPTD BOLMONG BOLTIM BOLMUT	BL	1.626.191.505,00	1.333.408.654,00	82,00	292.782.851,00
		BTL + BL	82.965.510.194,00	77.151.146.841,00	92,99%	5.814.363.353,00

KODE REKENING	URAIAN	DPA INDUK 2021	DPA PERUBAHAN 2021	BERTAMBAH/(BERKURANG)	REALISASI	
					KEUANGAN	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	70.546.681.629,00	70.774.042.245,00	227.360.616,00	65.687.825.074	93%
4.04.01.01.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	98.289.474,00	106.743.610,00	8.454.136,00	73.758.519	69%
4.04.01.01.01.01	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4.999.708,00	5.999.708,00	1.000.000,00	227.100	4%
4.04.01.01.01.02	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	82.027.791,00	91.690.151,00	9.662.360,00	70.449.419	77%
4.04.01.1.01.03	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD</i>	2.262.157,00	3.053.933,00	791.776,00	2.241.600	73%
4.04.01.1.01.06	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	8.999.818,00	5.999.818,00	(3.000.000,00)	840.400	14%
4.04.01.01.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	56.042.314.703,00	56.197.890.483,00	155.575.780,00	51.959.840.754	93%
4.04.01.01.02.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	54.309.790.167,00	54.309.790.167,00	0,00	50.167.580.412	92%
4.04.01.01.02.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	280.854.822,00	280.854.822,00	0,00	270.151.689	96%
4.04.01.01.02.03	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	866.650.964,00	981.009.773,00	114.358.809,00	936.448.124	95%
4.04.01.01.02.05	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	49.108.744,00	49.535.457,00	426.713,00	38.871.676	78%
4.04.01.01.02.07	<i>Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	535.910.006,00	576.700.264,00	40.790.258,00	546.788.853	95%
4.04.01.01.03	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100.863.113,00	108.359.372,00	7.496.259,00	103.754.805	103%
4.04.01.01.03.06	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100.863.113,00	108.359.372,00	7.496.259,00	103.754.805	96%
4.04.01.01.04	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	424.016.435,00	401.936.341,00	(22.080.094,00)	332.839.109	83%

4.04.01.01.04.02	<i>Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	91.774.397,00	79.811.796,00	(11.962.601,00)	64.239.650	80%
4.04.01.01.04.03	<i>Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	44.879.438,00	44.879.438,00	0,00	25.472.000	57%
4.04.01.01.04.05	<i>Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	287.362.600,00	277.245.107,00	(10.117.493,00)	243.127.459	88%
4.04.01.01.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	800.340.274,00	176.603.463,00	(623.736.811,00)	168.170.500	95%
4.04.01.01.05.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	482.625.000,00	161.904.000,00	(320.721.000,00)	153.504.500	95%
4.04.01.01.05.10	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	80.499.984,00	14.699.463,00	(65.800.521,00)	14.666.000	100%
4.04.01.01.05.11	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	237.215.290,00	0,00	(237.215.290,00)	-	#DIV/0!
4.04.01.01.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.879.269.594,00	1.114.747.758,00	(764.521.836,00)	1.084.278.372	97%
4.04.01.01.06.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	85.865.373,00	91.302.352,00	5.436.979,00	86.496.063	95%
4.04.01.01.06.05	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	1.034.998.490,00	501.277.213,00	(533.721.277,00)	496.423.070	99%
4.04.01.01.06.09	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	758.405.731,00	522.168.193,00	1.000.000,00	501.359.239	96%
4.04.01.01.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.851.035.349,00	3.010.625.751,00	1.159.590.402,00	2.871.735.500	95%
4.04.01.01.07.02	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	647.600.001,00	1.367.599.999,00	719.999.998,00	1.320.160.000	97%
4.04.01.01.07.06	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.203.435.348,00	1.643.025.752,00	439.590.404,00	1.551.575.500	94%
4.04.01.01.08	<i>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.071.345.595,00	3.845.079.651,00	(226.265.944,00)	3.539.562.187	92%
4.04.01.01.08.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.897.417,00	4.999.048,00	(898.369,00)	4.630.450	93%
4.04.01.01.08.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	1.210.375.000,00	957.700.000,00	(252.675.000,00)	829.951.663	87%
4.04.01.01.08.03	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	11.237.459,00	29.237.459,00	18.000.000,00	28.172.000	96%
4.04.01.01.08.04	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.843.835.719,00	2.853.143.144,00	9.307.425,00	2.676.808.074	94%

4.04.01.01.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	5.279.207.092,00	5.812.055.816,00	532.848.724,00	5.553.885.328	96%
4.04.01.01.09.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	116.853.220,00	118.353.220,00	1.500.000,00	89.952.532	76%
4.04.01.01.09.02	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.319.171.603,00	1.528.077.777,00	208.906.174,00	1.430.000.274	94%
4.04.01.01.09.06	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	135.946.850,00	159.801.119,00	23.854.269,00	137.360.600	86%
4.04.01.01.09.09	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3.707.235.419,00	4.005.823.700,00	298.588.281,00	3.896.571.922	97%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>163.166.298,00</b>	<b>130.766.507,00</b>	<b>(32.399.791,00)</b>	<b>118.362.800</b>	<b>91%</b>
4.04.01.01.19	<i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	163.166.298,00	130.766.507,00	(32.399.791,00)	118.362.800	91%
4.04.01.01.19.10	<i>Sub Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</i>	163.166.298,00	130.766.507,00	(32.399.791,00)	118.362.800	91%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>14.084.751.012,00</b>	<b>12.060.701.442,00</b>	<b>(2.024.049.570,00)</b>	<b>11.344.958.967</b>	<b>94%</b>
4.04.01.01.22	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	14.084.751.012,00	12.060.701.442,00	(2.024.049.570,00)	11.344.958.967	94%
4.04.01.01.22.01	<i>Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	190.763.601,00	160.818.417,00	(29.945.184,00)	119.360.000	74%
4.04.01.01.22.02	<i>Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	301.666.968,00	102.244.696,00	(199.422.272,00)	83.950.847	82%
4.04.01.01.22.03	<i>Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah</i>	48.979.752,00	48.979.752,00	0,00	36.475.500	74%
4.04.01.01.22.05	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	58.497.010,00	58.497.010,00	0,00	47.761.000	82%
4.04.01.01.22.06	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	3.051.494.259,00	3.050.261.294,00	(1.232.965,00)	2.974.038.529	98%
4.04.01.01.22.07	<i>Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	2.837.511.400,00	3.024.351.725,00	186.840.325,00	2.940.371.107	97%
4.04.01.01.22.08	<i>Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	3.994.082.536,00	3.891.132.376,00	(102.950.160,00)	3.685.426.481	95%

<b>4.04.01.01.22.09</b>	<b><i>Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i></b>	<b>180.337.033,00</b>	<b>180.336.633,00</b>	<b>(400,00)</b>	<b>136.720.200</b>	<b>76%</b>
<b>4.04.01.01.22.10</b>	<b><i>Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah</i></b>	<b>2.865.739.417,00</b>	<b>1.030.249.128,00</b>	<b>(1.835.490.289,00)</b>	<b>845.789.861</b>	<b>82%</b>
<b>4.04.01.01.22.12</b>	<b><i>Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i></b>	<b>485.183.062,00</b>	<b>443.336.065,00</b>	<b>(41.846.997,00)</b>	<b>404.583.942</b>	<b>91%</b>
<b>4.04.01.01.22.13</b>	<b><i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i></b>	<b>70.495.974,00</b>	<b>70.494.346,00</b>	<b>(1.628,00)</b>	<b>70.481.500</b>	<b>100%</b>
<b>J U M L A H</b>		<b>84.794.598.939,00</b>	<b>82.965.510.194,00</b>	<b>(1.829.088.745,00)</b>	<b>77.151.146.841</b>	<b>93%</b>

Adapun terdapat sisa anggaran disebabkan antara lain:

1. Untuk belanja tidak langsung (insentif), terdapat sisa bayar yang disebabkan oleh diberlakukannya evaluasi kinerja berdasarkan e-absensi terhadap kehadiran ASN;
2. Sejumlah kegiatan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan IV dan tidak ditunjang oleh kesiapan teknis sehingga tidak dapat memenuhi batas pemasukan Ganti Uang (GU).

Alokasi belanja yang sebagaimana tersebut diatas menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara berjalan baik dan lancar. Disatu sisi, hal ini berimplikasi positif bagi efektifitas pencapaian target PAD dan upaya yang berkelanjutan atas peningkatan pelayanan publik.

Alokasi belanja yang sebagaimana tersebut diatas menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara berjalan baik dan lancar. Disatu sisi, hal ini berimplikasi positif bagi efektifitas pencapaian target PAD dan upaya yang berkelanjutan atas peningkatan pelayanan publik.

### **Kondisi Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di BADAN PENDAPATAN DAERAH secara umum dalam keadaan / kondisi baik dan semuanya digunakan karena terus dilakukan rehabilitasi dan perbaikan atas gedung kantor, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor. Secara umum Pengelolaan barang milik Daerah melalui Manajemen dan Penggunaan Aset sesuai dengan Inventarisasi barang atau aset sebanyak jumlah yang digunakan dan dikuasai BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 40.793.262.200,-, sampai saat ini sudah tidak ada asset yang dalam kondisi baik yang tidak digunakan.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada **Tabel T-C 29**.

Untuk Periode Tahun 2021 (sebagai Tahun Akhir RENSTRA 2016-2021) terjadi peralihan proses penyusunan perencanaan program dan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, dan demikian juga dengan kodefikasi, dan nomenklatur sudah diatur melalui Permendagri nomor 90 Tahun 2020. Dengan demikian pelaksanaan Renja Tahun 2021 mengalami perubahan system penyusunan dan nomenklatur .

Demikian pula untuk pengukuran hasil pelaksanaan Renja 2021 setiap Triwulannya dapat dilihat pada penjelasan dalam **Formulir 55** tentang **Evaluasi Hasil terhadap Renja** Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Badan Pendapatan Daerah periode pelaksanaan Tahun 2021, dengan hasil evaluasi capaian realisasi sebesar **88,66%**.

**FORMULIR E.55**  
**EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:

- 1 Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal dalam rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah
- 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur
- 3 Terlaksanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah

TRIWULAN IV

N. o.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%)	Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																								
1.	Meningkatnya Pendapatan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Indeks Nil LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B	Nilai Akuntabilitas s Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Rata-Rata Minimum B	70.774,04 2.245	Nilai Akuntabilitas s Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata Minimum B	70.774,04 2.245	12.446,56 6.837	17.241,06 1.297	15.359,23 2.933	20.640,96 4.007	-	-	65.687.825,0 74	100	86,0 2	-	-	65.687,82 5.074	100	86,0 2	Bapenda				
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Nil LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B		106.743,6 10		106.743,6 10		517.000		22.387,20 4		50.854,31 5		73.758,519	100	42,0 1	-	-	73.758,51 9	100	42,0 1	Bapenda			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	5.999,708			4	Dokumen	5.999,708	2	Dokumen	-	227.100	4	Dokumen	227.100	100	3,79	4	Dokumen	227.100	100	3,79	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	91.690,15 1			1	Dokumen	91.690,15 1	-	Dokumen	-	22.387,20 4		Dokumen	48.062,21 5	100	76,8 3	1	Dokumen	70.449,419	100	76,8 3	Bapenda
		Koordinasi dan penyiapan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	3.053,933			1	Dokumen	3.053,933	-	Dokumen	-	2.241.600	1	Dokumen	2.241.600	100	73,4 0	1	Dokumen	2.241.600	100	73,4 0	Bapenda

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LKIP,EPRA	1 2	Laporan	5.999.818				1 2	Laporan	5.999.818	-	-	6	Lap	517.000		-	6	Lap	323.400	12	Lap	840.400	100	14,0 1	1 2	Lap	840.400	100	14,0 1	Bapenda		
																					Rat-a-rata Capaian Kinerja (%)			100	42,0 1				100	42,0 1			
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>56.197,89 0,483</b>						<b>56.197,89 0,483</b>			<b>11.513,81 0,892</b>			<b>15.020,90 8,311</b>			<b>11.735,41 0,479</b>			<b>13.689,71 1,072</b>			<b>Predikat Kinerja</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Ren da</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Ren da</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 4	Bulan	54.309,79 0,167				1 4	Bulan	54.309,79 0,167	3	bulan	11.250,60 3.722	5	bulan	14.567,35 2.162	3	bulan	11.355,41 8.806	3	bulan	12.994,20 5.722	14	bulan	50.167.580,41 2	100	92,3 7	1 4	bulan	50.167,58 0,412	100	92,3 7	Bapenda
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan	1 2	Bulan	280.854,8 22				1 2	Bulan	280.854,8 22	3	bulan	37.759,96 4	3	bulan	66.119,31 2	3	bulan	62.071,97 2	3	bulan	104.200,4 41	12	bulan	270.151,689	100	96,1 9	1 2	bulan	270.151,6 89	100	96,1 9	Bapenda
Penatausahaan dan Penilaian pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan	1 2	Bulan	981.009,7 73				1 2	Bulan	981.009,7 73	3	bulan	135.750,8 20	3	bulan	233.677,5 02	3	bulan	189.196,3 21	3	bulan	377.823,4 81	12	bulan	936.448,124	100	95,4 6	1 2	bulan	936.448,1 24	100	95,4 6	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	2	Laporan	49.535,45 7				2	Laporan	49.535,45 7	2	Laporan	20.516,77 6	2	Laporan	17.389,90 0	2	Laporan	965.000	2	Laporan	38.871,676	100	78,4 7	2	Laporan	38.871,67 6	100	78,4 7	Bapenda			
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, Semesteran	1 3	Laporan	576.700,2 64				1 3	Laporan	576.700,2 64	3	Laporan	69.179,61 0	4	Laporan	136.369,4 35	3	Laporan	127.758,3 80	3	Laporan	213.481,4 28	13	Laporan	546.788,853	100	94,8 1	1 3	Laporan	546.788,8 53	100	94,8 1	Bapenda
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	91,4 6						100	91,4 6			
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			<b>108.359,3 72</b>						<b>108.359,3 72</b>			<b>8.162,559</b>			<b>37.423,59 0</b>			<b>17.260,01 3</b>			<b>40.908,64 3</b>			<b>Predikat Kinerja</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Tin ggii</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Tin ggii</b>				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD	1 2	Laporan	108.359,3 72				1 2	Laporan	108.359,3 72	3	Laporan	8.162,559	3	Laporan	37.423,59 0	3	Laporan	17.260,01 3	3	Laporan	40.908,64 3	12	Laporan	103.754,805	100	95,7 5	1 2	Laporan	103.754,8 05	100	95,7 5	Bapenda
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	95,7 5						100	95,7 5			
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PD</b>	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Kewenangan PD			<b>401.936,3 41</b>						<b>401.936,3 41</b>			<b>34.464,19 5</b>			<b>123.766,7 55</b>			<b>57.143,78 0</b>			<b>117.464,3 79</b>			<b>Predikat Kinerja</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Tin ggii</b>	<b>San gat Tin ggii</b>	<b>Sang at Tin ggii</b>				



																		Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<b>KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>3.010.625 .751</b>				<b>3.010.625 .751</b>			-		<b>16.100.00 0</b>		<b>409.600.0 00</b>		<b>2.446.035 .500</b>		<b>2.871.735.50 0</b>	100	<b>95,4 8</b>	-	<b>2.871.735 .500</b>	100	<b>95,4 8</b>	Bapenda
Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	1.367.599.999			4 unit	1.367.599.999			-			-	2 unit	409.600.000	2 unit	910.560.000	4 unit	1.320.160.000	100	96,5 3	4 unit	1.320.160.000	100	96,5 3	Bapenda
Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 2 Bulan	1.643.025.752			1 2 Bulan	1.643.025.752			-	6 bulan	16.100.000	3 bulan	-	3 bulan	1.535.475.500	12 bulan	1.551.575.500	100	94,4 3	1 2 bulan	1.551.575.500	100	94,4 3	Bapenda	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	<b>95,4 8</b>			100	<b>95,4 8</b>
<b>KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>3.845.079 .651</b>				<b>3.845.079 .651</b>			<b>462.309.1 91</b>		<b>915.972.6 46</b>		<b>843.655.7 28</b>		<b>1.317.624 .622</b>		<b>3.539.562.18 7</b>	100	<b>92,3 7</b>	-	<b>3.539.562 .187</b>	100	<b>92,3 7</b>	Bapenda
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 2 Bulan	4.999.048			1 2 Bulan	4.999.048			-	1 2 bulan	4.630.450	-	bulan	-	bulan	-	12 bulan	4.630.450	100	92,6 3	1 2 bulan	4.630.450	100	92,6 3	Bapenda
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 2 Bulan	957.700.000			1 2 Bulan	957.700.000	3	bulan	112.662.450	3 bulan	250.126.401	3	bulan	199.391.255	3 bulan	267.771.557	12 bulan	829.951.663	100	86,6 6	1 2 bulan	829.951.663	100	86,6 6	Bapenda
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 2 Bulan	29.237.459			1 2 Bulan	29.237.459	3	bulan	1.800.000	3 bulan	2.800.000	3	bulan	3.572.000	3 bulan	20.000.000	12 bulan	28.172.000	100	96,3 6	1 2 bulan	28.172.000	100	96,3 6	Bapenda
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 2 Bulan	2.853.143.144			1 2 Bulan	2.853.143.144	3	bulan	347.846.741	3 bulan	658.415.795	3	bulan	640.692.473	3 bulan	1.029.853.065	12 bulan	2.676.808.074	100	93,8 2	1 2 bulan	2.676.808.074	100	93,8 2	Bapenda
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100	<b>92,3 7</b>			100	<b>92,3 7</b>
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>5.812.055 .816</b>				<b>5.812.055 .816</b>			<b>398.521.0 00</b>		<b>895.918.8 19</b>		<b>2.100.323 .278</b>		<b>2.159.122 .231</b>		<b>5.553.885.32 8</b>	100	<b>88,2 0</b>	-	<b>5.553.885 .328</b>	100	<b>88,2 0</b>	Bapenda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1 2 Bulan	118.353.220			1 2 Bulan	118.353.220			-	6 bulan	30.396.729	3	bulan	30.987.801	3 bulan	28.568.002	12 bulan	89.952.532	100	76,0 1	2 bulan	89.952.532	100	76,0 1	Bapenda

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 2	Bulan	1.528.077. 777			1 2	Bulan	1.528.077. 777	3	bulan	122.345.8 94	3	bulan	364.092.0 27	3	bulan	335.518.0 30	3	bulan	608.044.3 23	12	bulan	1.430.000.274	100	93,5 8	1 2	bulan	1.430.000. 274	100	93,5 8	Bapenda		
		Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	1 2	Bulan	159.801.1 19			1 2	Bulan	159.801.1 19	3	bulan	5.685.000	3	bulan	29.814.00 0	3	bulan	30.808.70 0	3	bulan	71.052.90 0	12	bulan	137.360.600	100	85,9 6	1 2	bulan	137.360.6 00	100	85,9 6	Bapenda		
		Pemeliharaan/Rchabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rchabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 2	Bulan	4.005.823. 700			1 2	Bulan	4.005.823. 700	3	bulan	270.490.1 06	3	bulan	471.616.0 63	3	bulan	1.703.008. 747	3	bulan	1.451.457. 006	12	bulan	3.896.571.922	100	97,2 7	1 2	bulan	3.896.571. 922	100	97,2 7	Bapenda		
																							Rat-a-rata Capaian Kin erja (%)													
2.	Meningkatnya Penerimaan dan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Dana Bagi Hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku			130.766.5 07					130.766.5 07						46.224.00 0			12.176.20 0			59.962.60 0		12		118.362.800	100	90,5 1	1 2		118.362.8 00	100	90,5 1	Bapenda	
		KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya urusan keuangan pengelolaan keuangan daerah			130.766.5 07				130.766.5 07						46.224.00 0			12.176.20 0			59.962.60 0		12		118.362.800	100	90,5 1	1 2		118.362.8 00	100	90,5 1	Bapenda		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		1 2	bulan	130.766.5 07			1 2	bulan	130.766.5 07	-		-	6	bulan	46.224.00 0	-		12.176.20 0	6	bulan	59.962.60 0	12	bulan	118.362.800	100	90,5 1	1 2	bulan	118.362.8 00	100	90,5 1	Bapenda		
																							Rat-a-rata Capaian Kin erja (%)													
3.	Meningkatnya Penerimaan dan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Ratio PAD (Terhadap PDRB Harga Berikut)			12.060.70 1.442			-		12.060.70 1.442				1.165.885 .800			3.174.164 .438			2.411.850 .321			4.593.058 .408				11.344.958.9 67	100	86,4 6	-		11.344.95 8.967	100	86,4 6	Bapenda
		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD Per Tahun Anggaran			12.060.70 1.442					12.060.70 1.442				1.165.885 .800			3.174.164 .438			2.411.850 .321			4.593.058 .408				11.344.958.9 67	100	86,4 6	-		11.344.95 8.967	100	86,4 6	Bapenda
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan Daerah	2	Dokumen	160.818.4 17			2	Dokumen	160.818.4 17	-		-	1	dokumen	41.404.00 0			5.516.000	1	dokumen	72.440.00 0	2	Dokumen	119.360.000	100	74,2 2	2	Dokumen	119.360.0 00	100	74,2 2	Bapenda		



**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian Renstra Bapenda s/d Tahun 2021**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.0 4.04.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM B	Rata-rata minimum B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM B	Rata-rata minimum B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM B	Rata-rata minimum BB	Tingkat capaian SAKIP BB
4.04.4.04 .04.01.01 .01	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah kebutuhan administrasi umum setiap bulan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	0	48 bln	80%
4.04.4.04 .04.01.01 .02	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan setiap bulan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	0	48 bln	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04 .04.01.01 .03	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	tersedianya kebutuhan administrasi barang dan jasa	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	0	48 bln	80%
4.04.4.04 .04.01.01 .04	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	0	48 bln	80%
4.04.4.04 .04.01.01 .05	Kegiatan Penataan Kearsipan	Jumlah kegiatan penataan karsipan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	4 kegiatan	80%
4.04.4.04 .04.01.01 .06	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	60 kali	36 kali	12 kali	12 kali	100%	0	48 kali	80%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
5.2.02.03	Pembangunan Gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	15 paket	2 paket	0	0	0%	0%	2 paket	13%
4.04.4.04 .04.01.02 .04	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	13 unit R4 / 12 unit R2	19 R4/13 R2	0	0	100%	0	19 R4/13 R2	0%
4.04.4.04 .04.01.02 .07	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan /perlengkapan gedung kantor	16 Paket	24 paket	0	0	100%	0	24 paket	0%
4.04. 04.04.01. 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Paket	3 paket	0	0	100%	0	3 paket	0%

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
4.04.4.04 .04.01.02 .04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	0	48 bln	80%
4.04.4.04 .04.01.02 .26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 TA	3 TA	1 TA	1 TA	100%	0	4 TA	80%
5.2.02.28	<i>Pengadaan mebeleur</i>	Terlaksananya pengadaan mebeleur	5 TA	3 TA	1 TA	1 TA	100%	0	4 TA	80%
4.04.4.04 .04.01.02 .42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Paket	8 paket	0	0	100%	0	8 paket	400%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
4.04.4.04 .04.01.03 .02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah orang / stelan	<b>300 Org/stelan</b>	286 org/286 stelan	286 org/286 stelan	286 org/286 stelan	100%	0	286 org/286 stelan	95%
4.04.4.04 .04.01.03 .05	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu (PSL)	Jumlah orang / stelan	61 org	61 org/stelan	0	0	100%	0	61 org/stelan	100%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDA</b>	<b>15 Paket Kegiatan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>140 orang</b>	<b>140 orang</b>	100%	<b>0</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04 .04.01.05 .03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek Implementasi Peraturan-perundangan	5 kegiatan	3 kegiatan	0	0	100%	0	3 kegiatan	60%
4.04.4.04 .04.01.05 .06	Pelatihan Kantor Sendiri Sekretariat SKPD	terlaksananya pelatihan kantor sendiri sekretariat SKPD	5 kegiatan	3 kegiatan	0	0	100%	0	3 kegiatan	60%
4.04.4.04 .04.01.05 .21	Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Penangan Pajak dan Retribusi	terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peningkatan kemampuan penanganan pajak dan retribusi	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	4 kegiatan	80%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; laporan/tahun sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>100% dari Laporan (LKIP 1, LAPORAN TAHUNAN 11, LPPD SKPD 1, LKPJ SKPD 1, Laporan Bulanan 132, Laporan fungsional bendahara 12, Laporan semesteran 22, Laporan EPRA 132)</b>	100%	<b>100% dari Laporan (LKIP 1, LAPORAN TAHUNAN 11, LPPD SKPD 1, LKPJ SKPD 1, Laporan Bulanan 132, Laporan fungsional bendahara 12, Laporan semesteran 22, Laporan EPRA 132)</b>	<b>100% dari Laporan (LKIP 1, LAPORAN TAHUNAN 11, LPPD SKPD 1, LKPJ SKPD 1, Laporan Bulanan 132, Laporan fungsional bendahara 12, Laporan semesteran 22, Laporan EPRA 132)</b>	100%	<b>0</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04 .04.01.06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	10 Laporan	6 laporan	6 laporan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun	100%	0	12 laporan	120%
4.04.4.04 .04.01.06 .02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan tentang pelaporan Keuangan Semesteran	110 Laporan	66 laporan	66 laporan	Jumlah Laporan tentang pelaporan Keuangan Semesteran	100%	0	132 laporan	120%
4.04.4.04 .04.01.06 .04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan tentang pelaporan Keuangan Akhir Tahun	55 laporan	33 laporan	33 laporan	Jumlah Laporan tentang pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	0	66 laporan	120%
4.04.4.04 .04.01.06 .25	Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Cakupan Jumlah laporan dalam rangka rekonsiliasi realisasi dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan bulanan Kantor pusat, 10 UPTB	960 laporan	576 laporan	576 laporan	Cakupan Jumlah laporan dalam rangka rekonsiliasi realisasi dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan bulanan Kantor pusat, 10 UPTB	100%	0	576 laporan	120%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 07</b>	<b>Program Penyelenggaraan Hari Hari Besar Kenegaraan/Kederahan</b>	<b>Jumlah kegiatan dalam rangka Hari-hari besar Kenegaraan/Kederahan</b>	<b>Keikutsertaan dalam pameran dan promosi (5 event)</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>4 kegiatan</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04 .04.01.07 .01	Pelaksanaan Pameran dan Promosi	Jumlah Kegiatan pameran dan promosi dalam rangka hari-hari besar kenegaraan dan kedaerahan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	4 kegiatan	80%
4.04.4.0 .4.04.01. 09	Program Perencanaan SKPD	Prosentase Cakupan dari total 4 dokumen perencanaan Renja SKPD , Renja Perubahan SKPD 2019, RKA 2020, RKA Perubahan 2019)	100% dari total 21 dokumen perencanaan Renja SKPD 2020, , Renja Perubahan SKPD 2019, RKA 2020, RKA Perubahan 2019)	100% dari total 5 dokumen perencanaan Renja SKPD 2020, , Renja Perubahan SKPD 2019, RKA 2020, RKA Perubahan 2019)	100% dari total 4 dokumen perencanaan Renja SKPD 2021, Renja Perubahan SKPD 2020, RKA 2021, RKA Perubahan 2020)	100% dari total 4 dokumen perencanaan Renja SKPD 2021, Renja Perubahan SKPD 2020, RKA 2021, RKA Perubahan 2020)	100%	0%		
4.04.4.04 .04.01.09 .01	penyusunan rencana strategi SKPD 2016 - 2020	Tersusunnya rencana strategi SKPD 2016 - 2020	1 dokumen induk, 1 dokumen perubahan	1 dokumen	0	0	100%	0%	1 dokumen	100%
4.04.4.04 .04.01.09 .02	Penyusunan Rencana kerja (Renja)	Tersusunnya rencana kerja (Renja) induk dan perubahan	10 dokumen Renja Induk dan perubahan)	4 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0	6 dokumen	60%
4.04.4.04 .04.01.09 .03	Penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA)	Tersusunnya rencana kerja anggaran(RKA)	10 dikumenRKA (Induk dan perubahan)	6 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0	8 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.0 4.04.01. 15	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan daerah yang optimal dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah	Pendapatan Daerah mencapai angka 3,5 Triliun Rupiah dan PAD sudah mencapai angka Rp. 1,243,034,325,00,-	PAD Rp. 1,285,997,928,920	PAD Rp. 1,306,462,695,102	PAD Rp. 1,306,462,695,102	100,45	0%		
	Inventarisasi/Pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak, retribusi dan alat-alat berat	Terlaksananya Inventarisasi/pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Alat-alat Berat/Besar	55 Laporan	33 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	0	44 laporan	80%
	Penunjang Pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang pengelolaan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	100%	0	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	100%
	Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui auto payment, SAMSAT delivery, SAMSAT Keliling, Drive thru	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	100%	0	10 SAMSAT/ 7 SAMSAT pembantu/7 SAMSAT Keliling/1Drive thru/ATM, Kantor POS	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Sumber Retribusi Daerah	terlaksananya kegiatan Peningkatan Sumber Retribusi Daerah	5 egiantan	3 kegiatan	1 kegiatan		100%	0%	4 kegiatan	80%
	Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Razia Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	100%	0%	15 Kabupaten/Kota	100%
	Sosialisasi dalam rangka optimalisasi PAD	terlaksananya Sosialisasi dalam rangka optimalisasi PAD	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	15 Kabupaten/Kota	100%	0%	15 Kabupaten/Kota	100%
	Forum komunikasi Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabutenten kota	terlaksananya kegiatan forum komunikasi Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabutenten kota	4 Kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	3 kegiatan	75%
	Pengelolaan Retribusi Daerah	terlaksananya pengelolaan retribusi daerah	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	100%	0%	1 TA	100%
	Sosialisasi Sadar pajak dan Retribusi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Retribusi Daerah kepada Masyarakat/Wajib retribusi	15 Kegiatan	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	0	12 kegiatan	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kajian Pengelolaan Retribusi Daerah	Menyiapkan Segala Usaha dan Kegiatan Untuk Merencanakan dan Mempersiapkan Bahan Kajian dan Merumuskan Kebijakan Teknis mengenai Penetapan Target Retribusi Daerah	5 dokumen Kajian	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0	4 dokumen	80%
	Pengelolaan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Terlaksanya koordinasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah (BPKAD, PT JR, SKPD Prov Sulut)	4 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	3 kegiatan	7500%
	Monitoring Evaluasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Terlaksananya monitoring evaluasi lain-lain pendapatan daerah yang sah	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	0	36 laporan	13%
	Rekonsiliasi pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Terlaksananya Rekonsiliasi pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	15 kegiatan	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	0	12 kegiatan	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Extensifikasi dan Intensifikasi potensi pajak daerah	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	0	60 laporan	100%
	Identifikasi, Inventarisasi dan Pengelolaan Data PBB-KB	terlaksananya Identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan data pajak daerah	20 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100 %	0%	16 laporan	0%
	Kajian Penetapan Pajak Daerah	Tersediannya Kajian penetapan pajak daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0%	4 dokuemen	80%
	Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi pajak daerah (PKB, PBBKB, BBNKB, PAP,PKAA, PKAB/AB,	4 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	4 kegiatan	100%
	Pengelolaan Kesamsatan	Terlaksananya pengelolaan kesAMSATAN	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	100 %	-	1 TA	100%
	Rekonsiliasi Pajak Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah (PKB, BNKB, PAP, PBBKB/ dan Pajak Rokok)	20 kegiatan / 20 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	4 kegiatan / 4 laporan	4 kegiatan / 4 laporan	100 %	0%	16 kegiatan / 16 laporan	80%
	Pemutahiran Data Pajak Daerah	Tersedianya laporan objek dan subjek pajak	60 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	0	60 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)	Terlaksananya penerbitan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi Wajib Pajak Daerah	4 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	4 kegiatan	100%
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan di 10 UPTD	60 Laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	0	60 laporan	100%
4.04.4.0 4.04.01. 33	Program Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya kajian potensi dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	10 kegiatan/5 dokumen /5 paket	10 kegiatan/5 dokumen /5 paket	10 kegiatan/5 dokumen /5 paket	10 kegiatan/5 dokumen /5 paket	100 %	0		
	Penyusunan Perubahan Target Pendapatan Daerah antar tahun anggaran	Terlaksananya penyusunan rencana anggaran dan perubahan Anggaran Pendapatan Daerah	10 Kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	0%	8 kegiatan	80%
	Pengkajian potensi sumber pendapatan daerah	Tersediannya kajian sumber-sumber pendapatan daerah, analisis perencanaan anggaran pendapatan	5 Dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0%	4 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyusunan Buku Profil SKPD	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Profil SKPD (Paket)	5 kegiatan / 5 buku	3 kegiatan//3 buku	1 kegiatan/1 buku	1 kegiatan/1 buku	100 %	0%	4 kegiatan//4 buku	80%
	Pengelolaan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Pengelolaan sistem pendapatan daerah sesuai kebutuhan Sistem SAMSAT online	60 bulan	36 bln	12 bulan	12 bulan	100 %	0%	48 bulan	80%
	Kajian data pendapatan	Tersusunnya Kajian data Pendapatan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	0%	4 dokumen	80%
	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemutakhiran Data Subyek dan Obyek Pajak	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	100 %	0%	1 TA%	100%
	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Data	Tersusunnya bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Data	12 Laporan	4 laporan Perda (Perda 3 dan Perda 5)	2 laporan Pergub (Pergub 30 dan Pergub ...)	2 laporan Pergub (Pergub 30 dan Pergub ...)	100 %	0%	4 laporan Perda , 2 Pergub	33%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 18</b>	<b>Program Pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil</b>	<b>Peningkatan tingkat kepatuhan administrasi, pengelolaan pendapatan, aset dan personil</b>	<b>10 UPTD dan KP</b>	<b>10 UPTD dan KP</b>	<b>10 UPTD dan KP</b>	<b>10 UPTD dan KP</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan / penatausahaan anggaran belanja, aset/barang inventaris dan kepegawaian	60 kegiatan/60 laporan	36 kegiatan / 36 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	100 %	0%	48 kegiatan / 48 laporan	80%
	Pembinaan teknis administrasi	terlaksananya kegiatan pembinaan teknis pengelolaan keuangan, aset dan personil	60 kegiatan/60 laporan	37 kegiatan / 36 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	100 %	0%	49 kegiatan / 49 laporan	80%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil temuan	60 kegiatan/60 laporan	24 kegiatan / 24 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	12 kegiatan / 12 laporan	100 %	0%	36 kegiatan / 36 laporan	80%
4.04.4.0 4.04.01. 18.19	Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya koordinasi penetapan alokasi dana bagi hasil	10 SK Gubernur Penetapan dana bagi hasil untuk 15 Kabupaten/Kota	6 SK Gubernur Penetapan dana bagi hasil untuk 15 Kabupaten/Kota	2 SK Gubernur Penetapan dana bagi hasil untuk 15 Kabupaten/Kota	2 SK Gubernur Penetapan dana bagi hasil untuk 15 Kabupaten/Kota	100 %	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rekonsiliasi pengelolaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak	Terlaksananya koordinasi, rekonsiliasi dan evaluasi rutin / berkala pengelolaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak	20 kegiatan/20 laporan	8 kegiatan/8 laporan	8 kegiatan/8 laporan	100%	100%	0%	16 kegiatan/16 laporan	80%
	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	Terlaksannya Monitoring evaluasi dan pelaporan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	20 kegiatan/20 laporan	12 kegiatan/12 laporan	12 kegiatan/12 laporan	100%	100%	0%	24 kegiatan/24 laporan	80%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	Mengkoordinasikan Perhitungan Penetapan Penyaluran dan Monev pelaksanaan penerimaan PAD dengan Instansi terkait untuk penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Prov.	20 kegiatan/20 laporan	12 kegiatan/12 laporan	12 kegiatan/12 laporan	100%	100%	0%	24 kegiatan/24 laporan	80%
<b>4.04.4.0 4.04.01. 33</b>	<b>Peningkatan Sistem informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	terwujudnya pengelolaansistem informasi management pendapatan daerah SAMSAT Online	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	0%	36 bln	60%
	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi sistem informasi pendapatan daerah	60 bulan	48 bln	12 bulan	12 bulan	100 %	0%	60 bln	100%
4.04.4.0 4.04.01. 34	Program Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Cakupan Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD, PATDA	20 kegiatan / 80 laporan	12 kegiatan / 48 laporan	4 kegiatan / 16 laporan	4 kegiatan / 16 laporan	100 %	0		
	Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	20 kegiatan / 20 laporan	12 kegiatan/12 laporan	4 kegiatan / 4 laporan	4 kegiatan / 4 laporan	100 %	0%	16 kegiatan/16 laporan	80%
	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya laporan pendapatan daerah	60 laporan	48laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	0	60 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5.02.01</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB		
<b>5.02.01. 1.01</b>	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01. 1.01.01</b>	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						3 dokumen	1 DOKUMEN	33,30%
<b>5.02.01. 1.01.02</b>	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD						1 Laporan	0	-
<b>5.02.01. 1.01.03</b>	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Laporan	0	-
<b>5.02.01. 1.01.06</b>	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD						12 Laporan	3 LAPORAN	25%

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.01.1.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01.1.02.01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah daftar Gaji dan Tunjangan ASN						14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	3 DAFTAR GAJI/1 DAFTAR TUNJANGAN	25%
<b>5.02.01.1.02.02</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 laporan	3 LAPORAN	25%
<b>5.02.01.1.02.03</b>	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD						12 laporan	3 BULAN	25%
<b>5.02.01.1.02.05</b>	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						2 laporan	1 LAPORAN	50%
<b>5.02.01.1.02.07</b>	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sementara SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sementara SKPD						17 LAPORAN	4 LAPORAN	23,50%
<b>5.02.01.1.03</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1 tahun anggaran		

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.01.1.03.06</b>	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD						12 laporan	3 LAPORAN	25%
5.02.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1 tahun anggaran		
5.02.001.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						3 Dokumen	0	0%
5.02.001.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						1 laporan	0	0%
5.02.001.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah						1 laporan	0	0%
<b>5.02.01.1.05</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01.1.05.02</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						269 ASN/270 THL	0	-

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.01.1.05.10</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1 laporan	1 LAPORAN	100%
<b>5.02.01.1.05.11</b>	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						2 laporan	0	-
<b>5.02.01.1.06</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01.1.06.04</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11 laporan	0	-
<b>5.02.01.1.06.05</b>	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						1 tahun anggaran	3bln	25%
<b>5.02.01.1.06.09</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						4 Laporan	0	-
<b>5.02.01.1.07</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01.1.07.02</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						2 KBM	0	-

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.01.1.07.06</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11 paket	0	-
<b>5.02.01.1.08</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1 tahun anggaran		
<b>5.02.01.1.08. 1</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11 Laporan	0	-
<b>5.02.01.1.08.02</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11 laporan	1 LAPORAN	9%
<b>5.02.01.1.08.03</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11 laporan	1 LAPORAN	9%
<b>5.02.01.1.08.04</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor						11 laporan	1 LAPORAN	9%
<b>5.02.01.1.09</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1 tahun anggaran		

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.01.1.09.01</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1 tahun anggaran	0	-
<b>5.02.01.1.09.02</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan						1 tahun anggaran	0	-
<b>5.02.01.1.09.06</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 tahun anggaran	3 LAPORAN	25%
<b>5.02.01.1.09.09</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 tahun anggaran	0	-
<b>5.02.02.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									
<b>5.02.02.1.05</b>	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						1 tahun anggaran		

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.02.1.05.10</b>	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						4 Laporan		
<b>5.02.04</b>	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku)						1,003%		
<b>5.02.04.1.01</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD pertahun Anggaran						1.413.292.259.344		
<b>5.02.04.1.01.01</b>	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah (Induk dan Perubahan)						2 dokumen	1 DOKUMEN	50%
<b>5.02.04.1.01.02</b>	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian pendapatan daerah 94 jenis pajak)						4 dokumen	1 DOKUMEN	25%
<b>5.02.04.1.01.03</b>	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah						12 laporan	0	-
<b>5.02.04.1.01.04</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Layanan						42 Unit Layanan	42 Unit Layanan	-
<b>5.02.04.1.01.05</b>	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah						5 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.06</b>	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						3 dokumen	0	-

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)</b>			<b>Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 (tahun n-1)</b>	<b>Perkiraan realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)</b>	
					<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>		<b>Realisasi Capaian</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
<b>5.02.04.1.01.07</b>	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah						5 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.08</b>	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak						100%	0	-
<b>5.02.04.1.01.09</b>	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah						2 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.10</b>	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah						10 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.11</b>	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Keberatan Wajib Pajak Daerah						1 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.12</b>	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						3 dokumen	0	-
<b>5.02.04.1.01.13</b>	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						2 dokumen	0	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BADAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan maka secara umum dapat disimpulkan bahwa semua target indikator sasaran telah tercapai dengan realisasi sebagaimana terlampir pada **Tabel T-C.30.** tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 terhadap TARGET RENSTRA Badan Pendapatan Daerah.

Tahun 2021 diperhadapkan dengan kondisi Pandemic COVID-19 Melalui Program dan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara tetap dilaksanakan dengan mengikuti Protocol Kesehatan dan mengoptimalkan elektronifikasi dan sistem online untuk penanganan pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada program utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan:

### 1. Intensifikasi potensi pajak

Melaksanakan penelusuran, perhitungan dan penagihan pajak air permukaan (PAP) melalui UPTD di wilayah Kabupaten/Kota, baik kepada perorangan (kepemilikan pribadi) dan perusahaan/badan usaha/Instansi yang beroperasi di wilayah Sulawesi utara

### 2. Implementasi Keputusan Mahkamah Agung

Dengan adanya putusan MK nomor 15/PUU-XV/2017 tanggal 19 September 2017, yang memutuskan berdasarkan adanya gugatan bahwa alat berat tidak bisa digolongkan dalam pengertian kendaraan bermotor dan perlu diatur kembali dimana harus merevisi UU nomor 28 Tahun 2009, sehubungan dengan hal merevisi UU membutuhkan waktu, maka MK memberikan waktu selama 3 Tahun untuk merevisi. Namun disampaikan dalam keputusan tersebut, selang waktu tersebut untuk alat berat masih berlaku hak penagihan.

### 3. Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Menghasilkan data kendaraan yang datang membayar pajak dapat dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor/Wajib Pajak yang datang

membayar pajak tahun 2021 sebanyak 305.109 Kbm (55,88%) dari total kendaraan bermotor tahun 2021 sebanyak 545.994 Kbm.

4. Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor:

Dalam kondisi Pandemic Covid-19 Untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan razia kendaraan bermotor diganti dengan kerjasama dengan Kopolisian, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh 10 UPTD-PPD untuk sosialisasi pembayaran PKB dan BBNKB.. Dengan adanya razia kendaraan bermotor dapat membuat masyarakat patuh pada aturan yang berlaku. Untuk Penindakan atau razia dilakukan dengan metodhe ETLE.

5. Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD:

Sosialisasi dan Optimalisasi PAD dilaksanakan dengan metode pertemuan, pembagian leaflet, iklan di media cetak dan media elektronik.

6. Kegiatan Forum Komunikasi Dipenda / BAPENDA Kabupaten / Kota:

Dilaksanakan untuk seluruh Dipenda/BAPENDA Kabupaten / Kota, Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali secara Virtual .

7. Penunjang Pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat Tagihan Pajak Daerah:

Penyampaian SKPD dan STPD diseluruh Pemerintah wilayah kabupaten / Kota hanya dilakukan 2 (duakali).

8. Pembangunan Aplikasi E-Pendapatan untuk mengefektifkan penyetoran dan pembayaran langsung ke KAS Daerah secara non tunai dengan menggunakan Kode Bayar oleh masing2 SKPD, lembaga wajip pajak, wajib retribusi.

9. Program See Samrat Smart

SeeSamratsmart adalah system penelusuran, penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor Sulawesi Utara. Aplikasi berbasis web ini ditunjang dengan system android yaitu pengecekan info pajak kendaraan bermotor sulut yang dilengkapi beberapa fitur yang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pajak kendaraan bermotor secara mudah, cepat, tepat dan transparan, kapan dan dimana saja. Dengan menggunakan system ini, masyarakat dapat dengan mudah

melakukan transaksi pembayaran baik melalui ATM/M-Banking Bank SulutGo.

**10. Samsat Baron Wilayah Manado dan sekitarnya (Sambalados)**

Sambalados merupakan fungsi penunjang sebagai wujud dari visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu "Terdepan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Prima" yang mencerminkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengedepankan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta bertindak sebagai leader dalam pengkoordinasian pemungutan pendapatan daerah bersama perangkat daerah pengelola pendapatan daerah.

**11. Penambahan Gerai / Outlet**

Tahun 2021 telah dilakukan pembukaan gerai pelayanan di Kantor cabang pembantu bank sulutGo Bolmut dan Tamako, Samsat kelurahan di Kotamobagu, samsat mobile di Modoinding.

**12. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan menyederhanakan system, regulasi, dan prosedur pelayanan**

**13. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak:**

BADAN PENDAPATAN DAERAH telah melaksanakan sistem seeSAMRATsmart untuk penelusuran kendaraan bermotor yang menunggak secara real time, mengukur hasil kinerja penelusuran individual ASN Bapenda, mengukur IKM masing – masing UPTD/SAMSAT, serta mengukur komponen perilaku ASN Bapenda.

- Melakukan Labeling KBM yang menunggak, himbauan kepada Kendaraan yang berplat luar wilayah Sulawesi utara ke lokasi tempat umum (Mall, Pasar, Rumah sakit dan area2 wisata dan juga perumahan2
- Menambah unit layanan mobil keliling 1 unit
- Penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk pembayaran PKB ditempat.
- Pembuatan sistem/aplikasi e-Pendapatan untuk PKB dan BBN-KB, serta Retribusi Daerah.

- A. Peningkatan sumber Retribusi Daerah, Kerjasama pemanfaatan:
- Digambarkan dengan terjadinya penambahan Wajib retribusi yang membayar Retribusi dari 45 Subyek Retribusi menjadi 51 Subyek Retribusi (Meningkat 13,33%).
- Peningkatan realisasi jasa usaha dengan ketambahan beberapa objek retribusi baru dan perubahan kenaikan tariff baru yang ditetapkan pada PERDA nomor 2 Tahun 2018 yang efektifnya berlaku di Tahun 2019 diantaranya retribusi Terminal Tipe B , terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) , retribusi tempat rekreasi dan wisata taman hutan raya H.V. Worang, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi Wisata gunung Mahawu.
  - Peningkatan realisasi perizinan tertentu yang disebabkan kenaikan tarif dalam Perda nomor 2 tahun 2018 pada retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan
  - Peningkatan kerjasama barang milik daerah khusunya tanah dan bangunan yang diperoleh penambahan BMD yang dikerjasamakan pada tahun 2021 sebanyak 2 BMD yang dikerjasamakan sehingga menjadi 26 BMD.
- B. Bekerja sama dengan Instansi BPMPD-PTSP dalam rangka Tax Clearance kepada Perusahaan atau Lembaga yang mengurus ijin usaha dengan memberlakukan Lunas Pajak (PKB, BBNKB).

Pada penjelasan indikator2 yang tergambar dalam **tabel T-C 30**, bahwa pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda sampai dengan Tahun 2021 diantaranya persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tercapai rata-rata 51% selama 5 tahun terhadap target kepatuhan 6-75%; Persentase peningkatan penerimaan BBNKB terealisasi 100% dari target , untuk persentase peningkatan wajib pajak PAP setiap tahun meningkat mendekati 100%/tahun; demikian juga dengan peningkatan wajib retribusi yang membayar dikisaran 82%-103% setiap tahun .

Di harapkan dalam situasi ketidakpastian yang dikarenakan oleh kondisi Pandemic dengan berbagai pembatasan-pembatasan maka optimalisasi penerimaan pendapatan diperlukan upaya2 yang

mengedepankan protocol kesehatan yang ketat namun tetap melakukan beberapa strategi di lapangan.

**T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2016-2021**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Prosentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	60	63	65	67	70	75	55,00	62,00	45,98	48,90	43,49	55,88	55,0	62,0	45,9	48,9	43,49%	0,74
2	Prosentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	-	-	7,00	7,90	13,78	(4,73)	(33,70)	56,41	7,00	10,85	13,60	(14,60)	(31,00)	35,85	100,00	137,34	98,69	(308,67)	(91,99 )	0,63
3	Prosentase Peningkatan wajib Pajak PAP	-	-	16	16	18	20	22	24	20	20	20	38	43	48,84	125,00	125,00	111,11	190,00	195,45	1,95
4	Peningkatan Wajib Retribusi yang membayar Retribusi	-	-	34	31	39	46	47	47	28	32	38	45	43	13,33	82,35	103,23	97,44	97,83	91,49	0,28
5	Kepatuhan Pelaporan Penyetoran PNBP dari Perusahaan	-	-	-	-		9 WP	14 WP	13 WP				8 WP	14 WP	7 WP				88,80%	100%	0,53
6	Kepatuhan Pemanfaatan DBH di Kab/Kota	-	-	-	-	-	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	-	-	-	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	-	100%	80%	80%	0,92
7	Prosentase Peningkatan Sarana Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	1:66 (perhari)	1:66 (perhari)	1:60 (perhari)	1:59 (perhari)	1:58 (perhari)	1:57 (perhari)	1:66 (perhari)	1:60 (perhari)	1:41 (perhari)	1:36 (perhari)	1:35 (perhari)	1:28 (perhari)	100%	110,00	146,34	163,89	165,71	2,03
1	<b>RASIO PAD</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>-0,01</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, terdapat beberapa isu-isu penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kinerja Pelayanan**

Sebagai bagian dari Tugas dan Fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara maka Kinerja Pelayanan ditetapkan pada misi ke 2 yaitu “ *Mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service), terpercaya, transparan dan akuntabel* ” dengan tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi.” Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengsinergikan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dalam bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Untuk menerapkan misi pelayanan di BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara merupakan hal yang sangat penting karena bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat lebih khusus pada pelayanan kepada wajib pajak, walaupun peningkatan pendapatan daerah meningkat tetapi jika tidak didukung dengan pelayanan prima kepada wajib pajak seperti yang tertuang dalam visi BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara, maka hal itu tidaklah dapat dinilai suatu keberhasilan karena peningkatan pendapatan daerah erat kaitannya dengan pelayanan kepada wajib pajak.

Untuk itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus di galakan dan ditingkatkan terutama prasarana dan sarana pelayanan seperti membuka UPTB/Samsat di seluruh Kabupaten dan Kota, membuka Samsat Drive Thru, Samsat Mall, Samsat Online, Samsat Keliling, penyediaan tempat pengaduan di setiap Samsat, membuka kantor kas PT. Bank Sulut yang rencananya akan dibuka di semua Samsat yang ada di Kabupaten dan Kota, transparansi penetapan PKB dan BBN-KB. Selain itu untuk

meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak, maka hal penting yang harus diubah adalah sikap mental petugas pelayanan yang sebaik-baiknya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesamsatan, dimana Samsat tersebut dinaungi oleh 4 (empat) instansi yang berbeda yaitu BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dan Bank Sulut Go hal ini tentunya harus mempunyai visi dan misi yang sama yaitu peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Oleh sebab itu berbagai permasalahan yang dihadapi Samsat dalam pelayanannya terus dibahas dan dicari solusi penyelesaiannya lewat Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali., serta melaksanakan Forum Komunikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH se Sulawesi Utara (Pemerintah Kabupaten/kota)

## **2. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

- 1) Keterbatasan SDM di beberapa UPTD, khususnya untuk tenaga organik PNS, baik untuk tenaga administrasi pengelola keuangan dan barang maupun petugas/aparatur untuk menjangkau para Wajib Pajak yang tersebar hingga ke pelosok, wilayah pesisir dan kepulauan, khususnya Wajib Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Pajak Alat-alat Berat/ Alat-alat Besar;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal menjadi kendala dalam kelancaran pelayanan dan penatausahaan serta pelaporan kinerja. Hal ini menyebabkan pelayanan publik di UPTD belum maksimal;
- 3) Kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan manfaat membayar Pajak Daerah (Provinsi) belum merata di semua wilayah / daerah, sehingga masih banyak yang menunggak pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor;
- 4) Kebijakan peningkatan pelayanan untuk kenyamanan dan kemudahan Wajib Pajak dengan meminta agar PT. Bank Sulut membuka Kantor Kas

Bank di semua UPTD/Samsat belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak PT.Bank Sulut;

- 5) Tingkat kerusakan/gangguan jaringan dan sistem untuk pelayanan pendapatan daerah masih sebesar 2%.
- 6) Database kendaraan Bermotor Sulawesi Utara belum sepenuhnya terintegrasi

Dalam rangka menyukseskan program "Provinsi Sulut Pelopor Sadar Pajak" sekaligus untuk mengatasi permasalahan selang Tahun 2019 diupayakan sejumlah solusi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan/pengadaan dan peningkatan sarana/prasarana diupayakan secara bertahap, diprioritaskan untuk semua yang berkenaan dengan pendekatan, kelancaran dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak, antara lain, ruangan dan fasilitas ruangan/loket pelayanan SAMSAT, peralatan dan perlengkapan serta komputerisasi untuk semua kegiatan pelayanan dan penatausahaan administrasi;
- 2) Untuk mengantisipasi kekurangan SDM, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain, *Rolling Staf*, baik di Kantor Pusat dan UPTD maupun antar unit kerja untuk memaksimalkan jumlah personil yang ada. Upaya lainnya yang ditempuh adalah dengan merekrut tenaga *outsourcing* untuk operator komputer dan petugas administrasi non fungsional;
- 3) Pengadaan dan pengembangan Database serta Jaringan SAMSAT Online menjadi prioritas utama selain untuk menjawab kebutuhan e-audit dari BPK-RI, juga untuk meningkatkan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa terkendala oleh batas wilayah;
- 4) Beberapa upaya yang sedang dilaksanakan dan perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, antara lain:
  - a) Melaksanakan pendataan / penyusunan data potensi kendaraan bermotor yang riil sesuai kondisi di lapangan.
  - b) Melaksanakan pemetaan potensi obyek/subyek Pajak Kendaraan Bermotor menurut wilayah, termasuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan tunggakan pajak baik kendaraan roda empat dan roda dua.

- c) Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan Penertiban / Razia Pajak Kendaraan Bermotor, kerja sama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan/DLLAJ, Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kab/Kota dan Polisi Militer setempat untuk menjaring semua jenis kendaraan / wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak, baik pelat hitam, pelat merah dan kendaraan operasional TNI/Polri, secara serentak dan terpadu di 15 kabupaten/kota.
- d) Inventarisasi obyek dan subyek potensi pajak kendaraan bermotor dan pemungutan langsung pajak daerah termasuk tunggakan pajak secara langsung dari rumah ke rumah (door to door) oleh aparat pemungut.
- e) Menjalin hubungan / meningkatkan hubungan kerja sama dengan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan bahkan sampai ke tingkat lingkungan untuk penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, BADAN PENDAPATAN DAERAH , ST BADAN PENDAPATAN DAERAH , SP1, SP2 dan seterusnya.
- f) Meningkatkan upaya pendataan/pemungutan langsung Pajak Alat Berat/Besar, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).
- g) Melaksanakan / meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik setiap minggu melalui pemberitaan pada beberapa surat kabar, TV dan radio lokal tentang ketentuan-ketentuan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Progresif yang menjadi konsekuensi dari setiap pemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit.
- h) Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat dalam bentuk kegiatan yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi, melaksanakan sosialisasi ke tingkat Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang juga melibatkan semua Perangkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan
- i) Melaksanakan sosialisasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat mengerahkan semua PNS di BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara, sampai ke

perangkat desa/kelurahan untuk menjadi pelopor kesadaran membayar pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- j) Melaksanakan sosialisasi dan rekonsiliasi data potensi melalui kerja sama dengan dealer, showroom dan semua lembaga keuangan penyedia fasilitas kredit pemilikan kendaraan bermotor.
- k) Sosialisasi melalui pemasangan baliho, spanduk dan billboard di tempat-tempat strategis, serta pengadaan dan pendistribusian barang cetakan berupa brosur, leaflet, dll.
- l) Melaksanakan Peremajaan jaringan dan sistem
- m) Melakukan MOU dengan DUKCAPIL, Kepolisian untuk integrasi data base Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak

### **3. Peluang dan Tantangan**

Beberapa peluang untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah yang telah teridentifikasi, antara lain:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomr 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka peluang peningkatan pendapatan daerah dapat memungkinkan karena dalam Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkannya pemungutan tarif pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu yaitu kepemilikan kendaraan bermotor pertama 1,5%, kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 2,25%, kepemilikan keempat sebesar 2,5% dan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75%. Demikian juga untuk kepemilikan kendaraan baru terdapat penurunan tarif BBN-KB dari 12,5% menjadi 10% serta kepemilikan kendaraan oleh Pemerintah, TNI dan POLRI (khusus TNI dan POLRI kendaraan yang bukan digunakan untuk operasional keamanan) dikenakan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,5%. Diharapkan dengan pemberlakuan Perda tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sulawsi Utara untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan

- Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang sangat membantu meringankan Denda Pajak dan Pokok Pajak untuk kendaraan sangat diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan;
3. Harapan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang dengan semakin meningkatnya investasi di daerah antara lain sebagai dampak dari adanya kegiatan meetings, incentives, convention and exhibition baik yang berskala nasional, regional dan internasional yang dilaksanakan di daerah Nyiur Melambai;
- Tantangan-tantangan dalam upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah yang telah teridentifikasi, antara lain:
1. Masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melunasi pajaknya terutama di beberapa daerah pelosok dan pesisir dikarenakan kesadaran masyarakat pemilik / pengguna kendaraan bermotor untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (khususnya kendaraan bermotor roda dua) masih rendah, dan jarak lokasi Pelayanan susah terjangkau.
  2. Demikian pula dengan masyarakat pemilik/pengguna Kendaraan Atas Air (sampai dengan bobot 5 sampai 7 Gross Ton) di wilayah pesisir dan di pulau-pulau, kesadaran untuk membayar Pajak Kendaraan Atas Air, masih sangat rendah, apalagi untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air;
  3. Pengembangan aplikasi Samsat online sangat dibutuhkan karena akan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dimana dapat membayar pajak disetiap Samsat sekaligus informasi yang cepat dan akurat dalam penatausahaan administrasi pengelolaan / penerimaan PAD dapat dimonitor dan dikontrol dari Kantor Pusat BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara sekaligus oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah. Aplikasi Samsat online tersebut saat ini sedang dirancang bekerjasama dengan PT. Bank Sulut sebagai pusat penyetoran penerimaan pajak daerah yang dikelolah oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara.

#### **4. Rekomendasi dan Catatan Penting**

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak yang sudah ditentukan, terdapat beberapa catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik antara lain renovasi gedung kantor Pusat, renovasi gedung kantor UPTB, pembangunan kantor UPTB serta peningkatan pelayanan Samsat dengan menambah tempat pelayanan Samsat Pembantu di kawasan strategis;
2. Mendorong dengan upaya konkret yang aktif dalam mensukseskan Program "Sulut Provinsi Pelopor Sadar Pajak" melalui kerjasama dan koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pengembangan aplikasi Samsat online di semua UPTB/Samsat;
4. Pengembangan sumber daya aparatur melalui diklat perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendapatan, pengawasan dan regular dan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Juru Sita;
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan mempersiapkan peralatan pendukung seperti brosur, sticker, baliho, pemasangan CCTV, pemberian cendramata kepada wajib pajak maupun sarana pendukung lainnya;
6. Perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah baik sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak, media massa, pemasangan baliho maupun sarana sosialisasi lainnya; melakukan Labeling di Pusat keramaian, fasilitas umum, area perbelanjaan dan kompleks perkantoran.; melakukan penelusuran penunggak pajak langsung "*door to door*".
7. Penambahan kendaraan dinas operasional yang berfungsi sebagai Samsat Keliling untuk menjangkau Wajib Pajak yang berada di lokasi terpencil;
8. Modernisasi/regenerasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
9. Melakukan Inovasi-Inovasi pelayanan public.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Berdasarkan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan 2 (dua) Program, 9 ( Sembilan)

kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan yang disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara.

Sehubungan dengan permintaan masyarakat untuk peningkatan pelayanan SAMSAT serta dari kendala-kendala yg dihadapi pemungut pajak BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara melakukan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait tugas dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH dalam penerimaan pajak daerah, maka diusulkan akan dilaksanakan program/kegiatan antara lain SAMSAT "Dukung" dimana Petugas yang akan menjemput langsung setoran Pajak kepada Wajib Pajak, Online Payment yaitu untuk kemudahan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak, Call Center untuk penanganan piutang kepada Wajib Pajak dengan cara menghubungi langsung Wajib Pajak agar segera menyelesaikan pembayaran tunggakan, Woman SAMLING sebagai upaya untuk intensifikasi penagihan pajak kepada Wajib Pajak di tempat/titik pada lokasi strategis/tempat umum yang mudah dijangkau dengan melibatkan peran wanita.

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai usulan rancangan awal RKPD 2023 yang tergambar dalam tabel **T-C. 31 .**

#### **Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023,** dibawah ini :

Dapat disimpulkan dan dirumuskan 1 (satu) kegiatan prioritas dan 13 (tiga belas) sub kegiatan prioritas yang akan menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan oleh BAPENDA pada periode Tahun 2023 :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
  - Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
  - Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
  - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
  - Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
  - Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
  - Penetapan Wajib Pajak Daerah
  - Pelayanan dan konsultasi pajak daerah

- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- Penagihan pajak daerah
- Penyelesaian keberatan pajak daerah
- Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan analisis pada Tabel T-C.31, maka diperoleh besaran dana untuk pembiayaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 20.528.299.244,25.- secara keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk 2 program adalah Rp. 74.838.089.411,25.-

Pembiayaan ini belum termasuk untuk alokasi penambahan 5 UPTD/SAMSAT Baru yang sudah diusulkan, 5 SAMSAT yang baru yaitu :

1. UPTD-PPD/SAMSAT di Kabupaten kepulauan Talaud;
2. UPTD-PPD/SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
3. UPTD-PPD/SAMSAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. UPTD-PPD/SAMSAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. UPTD-PPD/SAMSAT di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Utara**

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT											
Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
5.02	<b>KEUANGAN</b>				74.838.089.411,25	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					74.838.089.411,25
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	62.116.075.869,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	62.116.075.869,25	
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 tahun anggaran	113.938.584,92	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 tahun anggaran	113.938.584,92	
5.02.001.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.149.700,64	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.149.700,64	
5.02.001.1.01.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	78.093.180,66	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	78.093.180,66	

5.02.001.1.01.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	21.425.891,08	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	21.425.891,08	
5.02.001.1.01.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	9.269.812,54	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	9.269.812,54	
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	55.952.606.317,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	55.952.606.317,00	
5.02.001.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	54.309.790.167,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	54.309.790.167,00	
5.02.001.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	287.352.040,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	287.352.040,00	
5.02.001.1.02.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 laporan	856.934.647,00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 laporan	856.934.647,00	
5.02.001.1.02.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	51.493.306,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	51.493.306,00	
5.02.001.1.02.7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD	17 kegiatan	447.036.157,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD	17 kegiatan	447.036.157,00	
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	111.325.606,39	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	111.325.606,39	
5.02.001.1.03.6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	111.325.606,39	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	111.325.606,39	

5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	180.165.069,25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	180.165.069,25	
5.02.001.1.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	269 ASN/270 THL	46.665.086,00	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	269 ASN/270 THL	46.665.086,00	
5.02.001.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	80.499.984,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	80.499.984,00	
5.02.001.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 laporan	52.999.999,25	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 laporan	52.999.999,25	
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	706.399.893,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun anggaran	706.399.893,00	
5.02.001.1.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 laporan	271.401.403,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 laporan	271.401.403,00	
5.02.001.1.06. 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Pusat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun anggaran	34.998.490,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Pusat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun anggaran	34.998.490	
5.02.001.1.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 Laporan	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 Laporan	400.000.000	
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun anggaran	850.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun anggaran	850.000.000	
5.02.001.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Pusat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 KBM	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Pusat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 KBM	-	

	pengadaan Meubel	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Meubell	UNIT	50.000.000,00	pengadaan Meubel	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Meubell	UNIT	50.000.000	
5.02.001.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 paket	800.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 paket	800.000.000	
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun anggaran	2.126.581.484,69	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun anggaran	2.126.581.485	
5.02.001.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	110.244.918,69	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	110.244.919	
5.02.001.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 laporan	1.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 laporan	1.000.000.000	
5.02.001.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 laporan	16.336.566,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	11 laporan	16.336.566	
5.02.001.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	11 laporan	1.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	11 laporan	1.000.000.000	
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun anggaran	2.075.058.914,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun anggaran	2.075.058.914	
5.02.001.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Pusat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun anggaran	166.853.220,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Pusat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun anggaran	166.853.220	

5.02.001.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	1 tahun anggaran	1.453.995.694,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	1 tahun anggaran	1.453.995.694	
5.02.001.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun anggaran	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun anggaran	100.000.000	
5.02.001.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun anggaran	354.210.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun anggaran	354.210.000	
5.02.004	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku)	0,014	12.722.013.542,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku)	0,014	12.722.013.542	
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerimaan PAD pertahun Anggaran	1.433.353.083.973,00	12.722.013.542,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Penerimaan PAD pertahun Anggaran	1.433.353.083.973,00	12.722.013.542	
5.02.004.1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kantor Pusat	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah (Induk dan Perubahan)	2 dokumen	196.486.506,06	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kantor Pusat	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah (Induk dan Perubahan)	2 dokumen	196.486.506	
5.02.004.1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kantor Pusat	Jumlah Dokumen Kajian pendapatan daerah 94 jenis pajak)	4 dokumen	478.778.263,98	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kantor Pusat	Jumlah Dokumen Kajian pendapatan daerah 94 jenis pajak)	4 dokumen	478.778.264	
5.02.004.1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	12 laporan	50.449.147,65	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	12 laporan	50.449.148	
5.02.004.1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Unit Layanan	42 Unit Layanan	1.000.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Unit Layanan	42 Unit Layanan	1.000.000.000	
5.02.004.1.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah	5 dokumen	60.251.920,30	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah	5 dokumen	60.251.920	

5.02.004.1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 dokumen	1.104.039.090,17	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 dokumen	1.104.039.090	
5.02.004.1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	5 dokumen	3.100.316.957,92	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	5 dokumen	3.100.316.958	
5.02.004.1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak	100%	3.000.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak	100%	3.000.000.000	
5.02.004.1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah	2 dokumen	185.747.143,99	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah	2 dokumen	185.747.144	
5.02.004.1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	10 dokumen	2.551.693.548,07	Penagihan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	10 dokumen	2.551.693.548	
5.02.004.1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Keberatan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	1,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keberatan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	1	
5.02.004.1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3 dokumen	499.738.553,86	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3 dokumen	499.738.554	
5.02.004.1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 dokumen	494.512.409,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 dokumen	494.512.409	

**KETERANGAN :****1. JUMLAH PROGRAM = 2 PROGRAM****2. JUMLAH KEGIATAN = 9 KEGIATAN****3. JUMLAH SUB KEGIATAN = 39 SUB KEGIATAN**

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat**

Untuk Tahun 2023 tidak ada usulan Kegiatan dari Masyarakat .

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2023**

Rancangan awal ini juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 serta 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Kelima arahan tersebut mencakup : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi mandat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bidang pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA) sebagai bagian dari

Pengelolaan Keuangan Daerah maka Renstra SKPD disinkronisasikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; Tujuan pembangunan baik nasional dan daerah telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan itu sendiri.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023**

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah Sulawesi Utara terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *culture set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

Birokrasi pemerintahan belum efisien dan budaya pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien dan pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan publik. Masalah ini diperburuk

oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap memang sudah ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian harus diakui bahwa pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif.

Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan hasil penilaian kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Kinerja Pemerintah Daerah masih rendah terkait dengan signifikansi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (*outcome*); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, **isu-isu strategis** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Periode Renstra 2021-2026 mendatang adalah sebagai berikut:

#### A. Isue strategis secara Umum :

- a. Kapasitas Fiskal Daerah masih rendah, sehingga tingkat kemandirian Fiskal masih rendah, dan Tingkat ketergantungan terhadap Dana Transfer Pusat masih tinggi.
  - 1. Rasio terhadap PATDA sd Tahun 2021 adalah sebesar 34,03%
  - 2. Rasio PAD terhadap PATDA setelah dikurangi DAK Tahun 2021 adalah 46,1%
  - 3. Realisasi PAD dari target Tahun 2021 tidak mencapai 100%.

B. Isue Strategis Internal :

- b. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah aparatur dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah dan pengelolaan / penatausahaan Pendapatan Daerah (PATDA) yang akuntabel berbasis teknologi.
  - 1. Fasilitas sarana/prasarana pelayanan pada UPTD PPD-UPTD PPD dan penunjang pelayanan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk kenyamanan, kelancaran dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak.
  - 2. Sistem aplikasi pembayaran/penerimaan Pajak Daerah yang masih semi manual sering menjadi kendala kecepatan pelayanan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA).
  - 3. Sistem komputerisasi dan jaringan yang belum memungkinkan penatausahaan dan pelaporan serta pengawasan yang terintegrasi.
  - 4. Kurangnya sumber daya aparatur dengan kompetensi teknis penguasaan teknologi dan analis Perpajakan, dan Pengawas Pajak, serta belum adanya SDM sebagai Juru Sita.

5. Kurangnya sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan formal maupun dengan kompetensi teknis pengelolaan/penatausahaan administrasi pendapatan/keuangan daerah.
  6. Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan stakeholder lainnya belum maksimal karena pemanfaatan teknologi yang belum optimal termasuk layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk membayar pajak daerah secara online dengan cara pembayaran non tunai, serta layanan informasi lainnya seputar ketentuan pajak daerah.
- c. Jumlah aparatur yang belum memadai dan penyebaran aparatur yang tidak merata menjadi kendala untuk menjangkau wajib pajak / obyek pajak daerah yang tersebar hingga ke pelosok daerah, wilayah pesisir dan kepulauan, serta sikap dan mental aparatur yang belum memadai untuk mewujudkan pelayanan prima.
1. Penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air yang belum optimal karena kurangnya tenaga aparatur untuk menjangkau wajib pajak / obyek pajak yang tersebar hingga ke pelosok daerah, wilayah pesisir dan kepulauan.
  2. Penyebaran jumlah pegawai yang relatif tidak merata sesuai kebutuhan di setiap unit pelayanan.
  3. Perlunya pelatihan khusus serta pembinaan sikap dan mental bagi petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan petugas pada kantor/unit pelayanan pajak daerah dalam hal keramahan, sopan santun dan ketulusan dalam memberi pelayanan terbaik.

- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang berupaya menghindari kewajiban untuk membayar pajak daerah.
1. Perlunya upaya sosialisasi secara efektif kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dalam hal membayar pajak daerah serta ketentuan lainnya menyangkut pajak daerah.
  2. Keengganan dan kelalaian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah menyebabkan terjadinya akumulasi tunggakan (piutang) pajak daerah dari tahun ke tahun yang memerlukan upaya ekstra untuk penagihan dan pengelolaan/ penatausahaan administrasi dan akuntansi secara khusus.
- e. Jarak / jangkauan masyarakat ke unit pelayanan Pajak Daerah yang tersedia relatif jauh, terutama masyarakat di daerah Kabupaten pemekaran dengan kondisi geografis wilayah yang sulit khususnya di wilayah kepulauan.
1. Perlunya upaya pendekatan pelayanan dengan menambah/membuka unit-unit pelayanan baru pada wilayah Kabupaten/Kota hasil pemekaran, Outlet-outlet di Mall dan Pasar Modern.
  2. Perlunya upaya pendekatan pelayanan dengan menambah fasilitas unit layanan bergerak (mobile unit), samsat delivery, untuk memperluas jangkauan ke wajib pajak / penunggak pajak.
  3. Perlu meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih khusus pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk inventarisasi/pendataan,

penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, termasuk untuk menagih tunggakan pajak daerah lainnya.

- f. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah Kabupaten/Kota terutama di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang pemanfaatan Pajak (Daerah) Provinsi.
  - 1. Perlunya upaya sosialisasi ke Kabupaten/Kota tentang pentingnya upaya bersama untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PATDA) dari sektor pajak daerah sehubungan dengan pemanfaatan sebagian pajak daerah untuk dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota.
  - 2. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi untuk sinergitas program dan kegiatan melalui kerjasama Tim Pembina SAMSAT dengan Kabupaten/Kota melalui forum koordinasi / komunikasi untuk optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA).
  - 3. Perlunya kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka penelurusan Wajib Pajak melalui Sistem BABINKAMTIBMAS, Pembayaran secara Online bersama pihak Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya, serta Gerai-gerai ekonomi (Indomaret, Alfamart, Multimart, Kantor Pos).
  - 4. Perlunya kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka Menggali sumber-sumber Retribusi Daerah tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Landrent, Royalti).

Dengan demikian dengan memperhatikan aspek2 gambaran pelayanan Bapenda , sasaran jangka menengah kementerian dan aspek lainnya maka dirumuskan Issue Strategis yang akan menjadi dasar penetapan

Tujuan dan sasaran Bapenda selama 5 Tahun kedepan dalam RENSTRA 2021-2026 adalah :

**“ Terwujudnya Kemandirian FISKAL Daerah melalui Peningkatan PAD Sulawesi Utara”.**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan VISI dan MISI. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bercermin pada permasalahan Pokok yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Indeks Kapasitas Fiskal Daera sd Tahun 2020 masih Rendah (0,504), yang mencerminkan Tingkat Kesehatan Fiskal Daerah yang di lihat dari Rasio PAD terhadap PATDA masih di bawah 40%, dimana tingkat ketergantungan Daerah terhadap Dana Transfer Pusat masih tinggi, hal ini memberikan motivasi keinginan dan komitmen semua jajaran organisasi Badan yang memiliki obsesi dan tekad bersama untuk dapat mencapainya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah mencermati dan menganalisis perkembangan yang ada sekarang dan memprediksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan meningkatkan PAD itu sendiri sebagai perwujudan dari Kemantapan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih Optimal.

Hal mencerminkan pula sebuah gambaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu institusi dengan tugas dan mandat untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA), menggunakan pendekatan manajemen Pendapatan Daerah (PATDA) dalam melaksanakan fungsi perencanaan Pendapatan

Daerah (PATDA), mengorganisir aktivitas pengelolaan Pendapatan Daerah (PATDA), mengkoordinasikan unit kerja agar tercipta keselarasan kerja (sinkronisasi), mengedepankan efisiensi, mewujudkan pembinaan dan pengawasan internal serta pelaporan hasil kerja yang efektif.

Berdasarkan Visi Pemerintah Sulawesi Utara tersebut, ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima ( Excellent Service), terpercaya, transparan, dan akuntabel.
3. Mewujudkan SDM aparatur berdedikasi, integritas tinggi dan profesional. Di Bidang Teknologi Informatika Pendapatan Daerah
4. Membangun sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berbasis Digital dan Elektronifikasi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, dan diupayakan terfokus pada *outcome*. Dalam menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran dari Visi dan Misi untuk periode Rencana Strategis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan : Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah melalui Peningkatan PAD.

Sasaran : Tercapainya Kemandirian Fiskal.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran serta uraian Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam **Tabel T-C. 25.**

**Tabel T-C. 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda  
Tahun 2021-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Dasar (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kemandirian Fiskal melalui peningkatan pad	Tercapainya Kemandirian Fiskal	Rasio PAD (ADHK)	0,010	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011
3			Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Berdasarkan target RPJMD 2021-2026 penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) tahun 2023 sebesar **Rp. 4.094.407.075.591,-** yang terdiri dari :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>1. Pendapatan Asli Daerah sebesar</b> | <b>Rp.1.455.393.791.591,-</b> |
| <b>2. Dana Perimbangan / Transfer</b>    | <b>Rp.2.639.013.284.000,-</b> |
| <b>3. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>  | <b>Rp. 0,-</b>                |

Dapat dilihat ketergantungan Pendapatan Daerah didominasi alokasi Dana Transfer sebesar 66,0% (Enam puluh enam koma Persen) , sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,03% (Tiga Puluh empat koma nol tiga Persen), Pemerintah Daerah mentargetkan realisasi capaian PATDA sebesar 100% untuk Tahun 2023 dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengkoordinasian pengembangan pendapatan daerah, penyelenggaraan Urusan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan Pendapatan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum melalui Program dan Kegiatan yang sesuai dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dengan beberapa indikator lebih besar dari target yang ditetapkan dalam RPJMD seperti yang tercantum dalam Tabel Proyeksi Pendapatan daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD).

Demikian pula pada tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2021-2026 seperti pada Rancangan Renstra Bapenda Untuk tahun 2023 di targetkan PATDA sebesar Rp. 4.094.407.075.591.-, (lebih besar dari target 2021 ) yaitu Rp. 4.072.305.543.344,- (mendekati target 2021), besaran PAD Tahun 2023 Rp. 1.455.393.791.591.-; pajak daerah Rp. 1.149.962.344.088,- Retribusi Daerah Rp. 206.896.697.401,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 50.838.250.000 dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 47.696.500.102,- Hal ini memperlihatkan Dinamika Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Daerah dimana terjadi perubahan atau tidak sama antara Perencanaan RPJMD , Renstra dan RKPD, disebabkan Realisasi per tahun yang makin meningkat dengan adanya upaya2 Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan yang berbasis Kinerja Pendapatan.

Rancangan Target Pendapatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dalam RKPD Tahun 2023 masih sama dengan Rencana

Targat pada RPJMD 2021-2026 sebesar **Rp. 4.094.407.075.591,-** yang terdiri dari :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>1. Pendapatan Asli Daerah sebesar</b> | <b>Rp.1.455.393.791.591,-</b> |
| <b>2. Dana Perimbangan / Transfer</b>    | <b>Rp.2.639.013.284.000,-</b> |
| <b>3. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>  | <b>Rp. 0,-</b>                |

Dibandingkan tahun 2021 target Pendapatan sebesar

**Rp. 4.072.305.543.344,-** yang terdiri dari :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>1. Pendapatan Asli Daerah sebesar</b> | <b>Rp. 1.413.292.259.344,-</b> |
| <b>2. Dana Perimbangan sebesar</b>       | <b>Rp. 2.639.013.284.000,-</b> |
| <b>3. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>  | <b>Rp. 20.000.000.000,-</b>    |

Dari target yang ditetapkan tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 60.824.629,- atau 0.001%. Hal ini mengasumsikan Dana Perimbangan sama dengan target 2021. Hal ini bisa dijelaskan kenaikan PATDA dipengaruhi oleh Dana Transfer tidak ada kenaikan, Dana Hibah tidak ditargetkan lagi. Demikian pula dengan pendapatan dari penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan terjadi pengalihan target JKN yang pada Tahun 2021 ditargetkan Jenis penerimaan Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dari Skema pendapatan 5 Tahun (2021-2026) tergambaran kenaikan PAD sebesar 1%.

Dalam RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun 2021-2026, Proyeksi Pendapatan Daerah (PATDA) Tahun 2023 sebesar Rp. 4.094.407.075.591,- naik 0,001% dari tahun 2021 sebesar Rp. 4.072.305.543.344,-. Demikian pula Kenaikan PAD tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,42% atau sebesar Rp.1.455.393.791.591,- dari tahun 2021 sebesar Rp. 1.413.292.259.344,- dimana hanya bergerak untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Program Vaksinasi berhasil disamping protocol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga Pandemic COVID-19 dapat dipulihkan;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber Pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
3. Meningkatnya pemanfaatan asset daerah yang bernilai ekonomis.
4. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjukan dari peningkatan deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) industry Bitung serta Bank Sulut Go yang diharapkan kinerja akan lebih baik.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan public dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan penayagunaan badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
6. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

9. Mengembangkan system evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan

Disamping kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a) Peningkatan jangkauan pelayanan pajak daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak hingga ke pelosok Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah , untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
- c) Peningkatan pengawasan pengelolaan pajak daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap system dan aparatur pelaksana pemungutan pajak daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.
- d) Intensifikasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan persuasive dalam bentuk sosialisasi , inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hinggah ke tingkat Kecamatan,dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan persuasive dalam bentuk razia/penertiban yang di dukung oleh pihak Kepolisian.
- e) Sosialisasi dan *public relationship* melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mayarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah sekaligus manfaan pengelolaan pajak daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerjasama pemungutan pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi pendapatan daerah di Kabupaten/Kota;
- f) Peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi fungsi rapat-rapat koordinasi dan evaluasi

pengelolaan pendapatan daerah sebagai Forum Komunikasi, upaya-upaya pencapaian target pendapatan daerah sesuai peran dari tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;

- g) Penyesuaian tariff retribusi melalui inventarisasi dan analisis tariff jenis retribusi tertentu yang sudah layak di sesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
- h) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD;
- i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Cukai Hasil tembakau yang mulai di kelola pada akhir Tahun 2011.

### **3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 tahun maju 2023**

Dalam rangka Pemutahiran Program dan kegiatan sesuai Pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Implementasi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, nomenklatur program dan kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3807 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk pencapaian target PAD BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun 2023 dijabarkan dalam program dan kegiatan direncanakan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 sebanyak **2 (dua) Program** yang diimplementasikan dalam **9 (sembilan) Kegiatan** serta 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan sebagaimana terlampir pada **Tabel T.C. 33. Rencana Kerja tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.**

Dapat disimpulkan dan dirumuskan Badan Pendapatan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah akan melaksanakan 1 (satu) Program Teknis, 1(satu) Program Penunjang 1 (satu) kegiatan prioritas, 8 (delapan) kegiatan penunjang, 13 (tiga belas) sub kegiatan prioritas serta 26 (dua puluh enam) kegiatan penunjang akan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan oleh BAPENDA pada periode Tahun 2023 :

#### **Program Pengelolaan Pendapatan daerah**

- **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
- **Sub Kegiatan :**

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
5. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
6. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah

9. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
10. Penagihan pajak daerah
11. Penyelesaian keberatan pajak daerah
12. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk Tahun Maju 2023 , rencana program dan kegiatan diuraikan dalam 2 (dua ) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan, dengan rencana penganggaran ditetapkan penambahan 3% terhadap pagu Tahun 2023.

Dalam menghadapi kondisi yang tidak ada kepastian maka, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 2023 dan tahun maju 2023 tetap mengedepankan asas optimalisasi dan kemungkinan refocusing anggaran.

**Tabel T-C.33**  
**Rencana Kerja tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Utara**

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5.02	<b>KEUANGAN</b>				74.838.089.411,25				77.947.291.771,37
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	62.116.075.869,25	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah ; INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB	64.696.733.007,53
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 tahun anggaran	113.938.584,92	APBD		1 tahun anggaran	117.356.742,47
5.02.001.1.01.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	3 dokumen	5.149.700,64	APBD		3 dokumen	5.304.191,66
5.02.001.1.01.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 Laporan	78.093.180,66	APBD		1 Laporan	80.435.976,08
5.02.001.1.01.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 Laporan	21.425.891,08	APBD		1 Laporan	22.068.667,81
5.02.001.1.01.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	12 Laporan	9.269.812,54	APBD		12 Laporan	9.547.906,92
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 tahun anggaran	55.952.606.317,00	APBD		1 tahun anggaran	57.595.311.106,72

<b>5.02.001.1.02.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	54.309.790.167,00	APBD		14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	55.939.083.872,01
<b>5.02.001.1.02.2</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	12 laporan	287.352.040,00	APBD		12 laporan	287.352.040,00
<b>5.02.001.1.02.3</b>	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	12 laporan	856.934.647,00	APBD		12 laporan	856.934.647,00
<b>5.02.001.1.02.5</b>	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	2 laporan	51.493.306,00	APBD		2 laporan	51.493.306,00
<b>5.02.001.1.02.7</b>	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	17 kegiatan	447.036.157,00	APBD		17 kegiatan	460.447.241,71
<b>5.02.001.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>111.325.606,39</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>114.665.374,58</b>
<b>5.02.001.1.03.6</b>	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	12 laporan	111.325.606,39	APBD		12 laporan	114.665.374,58
<b>5.02.001.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>180.165.069,25</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>280.255.069,91</b>
<b>5.02.001.1.05.2</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	269 ASN/270 THL	46.665.086,00	APBD		269 ASN/270 THL	46.665.086,00
<b>5.02.001.1.05.10</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 laporan	80.499.984,00	APBD		1 laporan	80.499.984,00
<b>5.02.001.1.05.11</b>	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	2 laporan	52.999.999,25	APBD		2 laporan	153.089.999,91
<b>5.02.001.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>706.399.893,00</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>706.399.893,00</b>
<b>5.02.001.1.06. 4</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	11 laporan	271.401.403,00	APBD		11 laporan	271.401.403,00
<b>5.02.001.1.06. 5</b>	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Pusat	1 tahun anggaran	34.998.490,00	APBD		1 tahun anggaran	34.998.490,00
<b>5.02.001.1.06. 9</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	4 Laporan	400.000.000,00	APBD		4 Laporan	400.000.000,00
<b>5.02.001.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>850.000.000,00</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>851.500.000,00</b>

<b>5.02.001.1.07.2</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Pusat	2 KBM	-	APBD		2 KBM	-
	pengadaan Meubel	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Meubell	UNIT	50.000.000,00				51.500.000,00
<b>5.02.001.1.07.6</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	11 paket	800.000.000,00	APBD		11 paket	800.000.000,00
<b>5.02.001.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota</b>	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>2.126.581.484,69</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>2.356.549.704,25</b>
<b>5.02.001.1.08.1</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	11 Laporan	110.244.918,69	APBD		11 Laporan	113.552.266,25
<b>5.02.001.1.08.2</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	11 laporan	1.000.000.000,00	APBD		11 laporan	1.000.000.000,00
<b>5.02.001.1.08.3</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	11 laporan	16.336.566,00	APBD		11 laporan	26.336.566,00
<b>5.02.001.1.08.4</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	11 laporan	1.000.000.000,00	APBD		11 laporan	1.216.660.872,00
<b>5.02.001.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota</b>	<b>1 tahun anggaran</b>	<b>2.075.058.914,00</b>	APBD		<b>1 tahun anggaran</b>	<b>2.674.695.116,60</b>
<b>5.02.001.1.09.1</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Pusat	1 tahun anggaran	166.853.220,00	APBD		1 tahun anggaran	171.858.816,60
<b>5.02.001.1.09.2</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Ktr. Pusat dan 10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	1 tahun anggaran	1.453.995.694,00	APBD		1 tahun anggaran	1.750.000.000,00
<b>5.02.001.1.09.6</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	1 tahun anggaran	100.000.000,00	APBD		1 tahun anggaran	103.000.000,00
<b>5.02.001.1.09.9</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 UPTB di 15 Kabupaten/Kota	1 tahun anggaran	354.210.000,00	APBD		1 tahun anggaran	649.836.300,00
<b>5.02.004</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku)</b>	<b>Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota</b>	<b>0,014</b>	<b>12.722.013.542,00</b>	APBD		<b>0,013</b>	<b>13.250.558.763,84</b>
<b>5.02.004.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Penerimaan PAD pertahun Anggaran</b>	<b>Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota</b>	<b>1.413.292.259.344</b>	<b>12.722.013.542,00</b>	APBD		<b>1.413.292.259.344</b>	<b>13.250.558.763,84</b>
<b>5.02.004.1.01 01</b>	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah (Induk dan Perubahan)	Kantor Pusat	2 dokumen	196.486.506,06	APBD		2 dokumen	202.381.001,83
<b>5.02.004.1.01 02</b>	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian pendapatan daerah 94 jenis pajak)	Kantor Pusat	4 dokumen	478.778.263,98	APBD		4 dokumen	493.141.611,96

<b>5.02.004.1.01 03</b>	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	12 laporan	50.449.147,65	<b>APBD</b>		12 laporan	51.962.622,08
<b>5.02.004.1.01 04</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Layanan	Provinsi Sulawesi Utara	42 Unit Layanan	1.000.000.000,00	<b>APBD</b>		42 Unit Layanan	1.176.884.914,96
<b>5.02.004.1.01 05</b>	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Objek Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	5 dokumen	60.251.920,30	<b>APBD</b>		5 dokumen	62.059.477,91
<b>5.02.004.1.01 06</b>	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provinsi Sulawesi Utara	3 dokumen	1.104.039.090,17	<b>APBD</b>		3 dokumen	1.137.160.262,88
<b>5.02.004.1.01 07</b>	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	5 dokumen	3.100.316.957,92	<b>APBD</b>		5 dokumen	3.193.326.466,66
<b>5.02.004.1.01 08</b>	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	100%	3.000.000.000,00	<b>APBD</b>		100%	3.090.000.000,00
<b>5.02.004.1.01 09</b>	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	2 dokumen	185.747.143,99	<b>APBD</b>		2 dokumen	191.319.558,31
<b>5.02.004.1.01 10</b>	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	10 dokumen	2.551.693.548,07	<b>APBD</b>		10 dokumen	2.628.244.354,51
<b>5.02.004.1.01 11</b>	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Keberatan Wajib Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,00	<b>APBD</b>		1 dokumen	1,00
<b>5.02.004.1.01 12</b>	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	3 dokumen	499.738.553,86	<b>APBD</b>		3 dokumen	514.730.710,48
<b>5.02.004.1.01 13</b>	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ktr. Pusat dan 10 UPTD PPD di 15 Kabupaten/Kota	2 dokumen	494.512.409,00	<b>APBD</b>		2 dokumen	509.347.781,27

**KETERANGAN :****1. JUMLAH PROGRAM = 2 PROGRAM****2. JUMLAH KEGIATAN = 9 KEGIATAN****3. JUMLAH SUB KEGIATAN = 39 SUB KEGIATAN**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara diperlukan perencanaan dan pengalokasian Dana.

Pada Tahun 2023 Program kegiatan yang menjadi prioritas adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan ) sub kegiatan untuk mendorong terciptanya kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Program perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan 2 kegiatan yang utama, program peningkatan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pengembangan sistem informasi managemen dan pengembangan penyediaan jaringan sistem Online ke unit-unit pelayaan yang berbasis Teknologi informasi.

Sehubungan dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi daerah pada program pengelolaan pendapatan daerah di utamakan dalam rangka penggalian sumber potensi Pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Perda Retribusi daerah yang baru Nomor 5 tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Untuk optimalisasi pendapatan dari sumber Lain-lain PAD yang sah pada program Pengelolaan pendapatan , sedangkan program optimalisasi dana perimbangan diutamakan pada kegiatan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil oleh Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pengawasan internal di fokuskan pada kegiatan pembinaan teknis administrasi, pengawasan rutin berkala penerimaan pajak daerah, evaluasi kinerja dengan melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dilakukan oleh fungsi dan tugas Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan

Pendapatan daerah pada 10 UPTD di 15 Kabupaten/kota ditunjang dengan kegiatan yang terdiri dari : Kerjasama penertiban Kendaraan bermotor, Pelayanan pada wajib pajak, inventarisasi/pendataan, penetapan dan penagihan pajak, retribusi dan alat-alat berat, serta sosialisasi dalam rangka Optimalisasi PAD.

Dengan demikian maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan Komponen Pendapatan Daerah (PATDA) . Hal ini dapat menjelaskan bahwa tingkat kapasitas Fiskal daerah sangat ditentukan oleh peningkatan PAD setiap tahunnya. Hal ini tergambar dalam Tabel: **T-C.27** rencana program , kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut.

**T-C 27 RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2021-2026**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULUT**

PROGRAM/KEGIATAN AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI			
			Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)							
			TARGET	PGU	TARGET	PGU	TARGET	PGU	TARGET	PGU	TARGET	PGU						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Rasio PAD (ADHK)	0,015	0,015		0,014		0,013		0,012		0,011		0,011					
	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	-0,03	-0,03		-0,03		-0,03		-0,03		-0,03		-0,03					
KEUANGAN		84.631.432.641,00		84.794.598.939,00		74.838.089.411,25		77.947.291.771,37		80.232.426.313,36		81.261.696.666,749		81.261.696.667,49				
PROGRAM PENGELOLaan PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD	14.084.751.012,00	0,015	14.414.558.743,00	0,014	12.722.013.542,00	0,013	13.250.558.763,84	0,012	13.639.357.527,20	0,011	13.813.987.150,43	0,011	13.813.987.150,43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROVINSI SULUT		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD pertahanan anggaran	14.084.751.012,00	1.413.292.259.344,00	14.414.558.743,00	1.433.353.083.973,00	12.722.013.542,00	1.453.884.089.637,00	13.250.558.763,84	1.476.837.324.727,00	13.639.357.527,20	1.503.362.050.303,00	13.813.987.150,43	1.530.680.140.152,00	13.813.987.150,43				
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	190.763.601,00	2 dokumen	190.763.601,00	2 dokumen	196.486.506,06	2 dokumen	202.381.001,83	2 dokumen	208.452.534,89	2 dokumen	208.452.537,43	2 dokumen	208.452.537,43				
Analisa dan Penyusunan Peraturan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kajian pendapatan daerah	301.666.968,00	4 dokumen	464.833.266,00	4 dokumen	478.778.263,98	4 dokumen	493.141.611,96	4 dokumen	507.935.860,26	4 dokumen	289.390.460,26	4 dokumen	289.390.460,26				
Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan sosialisasi pajak daerah	48.979.752,00	12 laporan	48.979.755,00	12 laporan	50.449.147,65	12 laporan	51.962.622,08	12 laporan	53.521.500,74	12 laporan	53.521.500,74	12 laporan	53.521.500,74				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Layanan	-		1,00	42 unit layanan	1.000.000.000,00	44 unit layanan	1.176.884.914,96	46 unit layanan	1.203.473.359,86	48 unit layanan	1.382.069.414,86	50 unit layanan	1.382.069.414,86				
Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen objek pajak daerah	58.497.010,00	5 dokumen	58.497.010,00	5 dokumen	60.251.920,30	5 dokumen	62.059.477,91	5 dokumen	63.921.262,25	5 dokumen	63.921.262,25	5 dokumen	63.921.262,25				
Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	3.051.494.259,00	3 dokumen	3.051.494.259,00	3 dokumen	1.104.039.090,17	3 dokumen	1.137.160.262,88	3 dokumen	1.171.275.070,76	3 dokumen	1.171.275.070,76	3 dokumen	1.171.275.070,76				

<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	Jumlah dokumen wajib pajak daerah	2.837.511.400,00	5 dokumen	3.010.016.464,00	5 dokumen	3.100.316.957,92	5 dokumen	3.193.326.466,66	5 dokumen	3.289.126.260,66	5 dokumen	3.387.800.048,48	5 dokumen	3.387.800.048,48		
<i>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	Persentase pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak	3.994.082.536,00	1,00	3.840.126.633,00	1,00	3.000.000.000,00	1,00	3.090.000.000,00	1,00	3.182.700.000,08	1,00	3.182.700.000,00	1,00	3.182.700.000,00		
<i>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>	Jumlah dokumen analisis dan verifikasi pajak daerah	180.337.033,00	2 dokumen	180.337.033,00	2 dokumen	185.747.143,99	2 dokumen	191.319.558,31	2 dokumen	197.059.145,06	2 dokumen	197.059.145,06	2 dokumen	197.059.145,06		
<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	2.865.739.417,00	10 dokumen	2.589.815.249,00	10 dokumen	2.551.693.548,07	10 dokumen	2.628.244.354,51	10 dokumen	2.707.091.685,15	10 dokumen	2.707.091.685,15	10 dokumen	2.707.091.685,15		
<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	Jumlah Laporan keberatan wajib pajak daerah	-	-	1,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00								
<i>Pengabdian, Pemerintahan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	Jumlah laporan pengabdian, pemerintahan dan pengawasan pajak	485.183.062,00	3 dokumen	485.183.062,00	3 dokumen	499.738.553,86	3 dokumen	514.730.710,48	3 dokumen	530.172.631,79	3 dokumen	546.077.810,74	3 dokumen	546.077.810,74		
<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	70.495.974,00	2 dokumen	494.512.409,00	2 dokumen	494.512.409,00	2 dokumen	509.347.781,27	2 dokumen	524.628.214,71	2 dokumen	524.628.214,71	2 dokumen	524.628.214,71		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>70.380.040.196,00</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>70.380.040.196,00</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>62.116.075.869,25</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>64.696.733.007,53</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>66.593.068.786,16</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>67.447.709.517,06</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah : INDEKS NILAI LKIP SKPD Badan Pendapatan Daerah RATA - RATA MINIMUM BB</b>	<b>67.447.709.517,06</b>		
<i>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	98.289.474,00	1 tahun anggaran	110.619.985,00	1 tahun anggaran	113.938.584,92	1 tahun anggaran	117.356.742,47	1 tahun anggaran	120.877.444,74	1 tahun anggaran	126.043.100,23	1 tahun anggaran	126.043.100,23		
<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4.999.708,00	3 dokumen	4.999.709,00	3 dokumen	5.149.700,64	3 dokumen	5.304.191,66	3 dokumen	5.463.317,41	3 dokumen	5.463.317,02	3 dokumen	5.463.317,02		
<i>Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	82.027.791,00	1 Laporan	75.818.622,00	1 Laporan	78.093.180,66	1 Laporan	80.435.976,08	1 Laporan	82.849.055,36	1 Laporan	82.849.055,36	1 Laporan	82.849.055,36		
<i>Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.262.157,00	1 Laporan	20.801.836,00	1 Laporan	21.425.891,08	1 Laporan	22.068.667,81	1 Laporan	22.730.727,85	1 Laporan	22.730.727,85	1 Laporan	22.730.727,85		
<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	8.999.818,00	12 Laporan	8.999.818,00	12 Laporan	9.269.812,54	12 Laporan	9.547.906,92	12 Laporan	9.834.344,12	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00		
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.042.314.703,00	1 tahun anggaran	56.052.606.317,00	1 tahun anggaran	55.952.606.317,00	1 tahun anggaran	57.595.311.106,72	1 tahun anggaran	59.323.170.439,92	1 tahun anggaran	59.323.170.439,92	1 tahun anggaran	59.323.170.439,92		
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah daftar Gaji dan Tunjangan ASN	54.309.790.167,00	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	54.309.790.167,00	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	54.309.790.167,00	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	55.939.083.872,01	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	57.617.256.388,17	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	57.617.256.388,17	14 daftar gaji/4 daftar tunjangan	57.617.256.388,17		
<i>Penyeian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	280.854.822,00	12 laporan	287.352.040,00	12 laporan	287.352.040,00	12 laporan	287.352.040,00	12 laporan	295.972.601,20	12 laporan	295.972.601,20	12 laporan	295.972.601,20		
<i>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	866.650.964,00	12 laporan	856.934.647,00	12 laporan	856.934.647,00	12 laporan	856.934.647,00	12 laporan	882.642.686,41	12 laporan	882.642.686,41	12 laporan	882.642.686,41		

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	49.108.744,00	2 laporan	51.493.306,00	2 laporan	51.493.306,00	2 laporan	51.493.306,00	2 laporan	53.038.105,18	2 laporan	53.038.105,18	2 laporan	53.038.105,18		
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sem esteran SKPD	535.910.006,00	17 kegiatan	547.036.157,00	17 kegiatan	447.036.157,00	17 kegiatan	460.447.241,71	17 kegiatan	474.260.658,96	17 kegiatan	474.260.658,96	17 kegiatan	474.260.658,96		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.863.113,00	1 tahun anggaran	108.083.113,00	1 tahun anggaran	111.325.606,39	1 tahun anggaran	114.665.374,58	1 tahun anggaran	118.105.335,82	1 tahun anggaran	118.105.335,82	1 tahun anggaran	118.105.335,82		
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100.863.113,00	12 laporan	108.083.113,00	12 laporan	111.325.606,39	12 laporan	114.665.374,58	12 laporan	118.105.335,82	12 laporan	118.105.335,82	12 laporan	118.105.335,82		
Administrasi Pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah		424.016.435,00														
Analisa dan pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan Kebijakan retibusi daerah		91.774.397,00														
Penyuluhan dan penyebarkan kebijakan retibusi daerah		44.879.438,00														
Pengolahan Data Retribusi Daerah		287.362.600,00														
Administrasi Kepagawaihan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepagawaihan Perangkat Daerah	800.340.274,00	1 tahun anggaran	785.740.274,00	1 tahun anggaran	180.165.069,25	1 tahun anggaran	280.255.069,91	1 tahun anggaran	288.662.722,01	1 tahun anggaran	290.980.022,10	1 tahun anggaran	290.980.022,10		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkappannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkappannya	482.625.000,00	269 ASN/270 THL	468.025.000,00	269 ASN/270 THL	46.665.086,00	269 ASN/270 THL	46.665.086,00	269 ASN/270 THL	48.065.038,58	269 ASN/270 THL	48.065.038,58	269 ASN/270 THL	48.065.038,58		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.499.984,00	1 laporan	80.499.984,00	1 laporan	80.499.984,00	1 laporan	80.499.984,00	1 laporan	82.914.983,52	1 laporan	82.914.983,52	1 laporan	82.914.983,52		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	237.215.290,00	2 laporan	237.215.290,00	2 laporan	52.999.999,25	2 laporan	153.089.999,91	2 laporan	157.682.699,91	2 laporan	160.000.000,00	2 laporan	160.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.879.269.594,00	1 tahun anggaran	2.152.576.734,00	1 tahun anggaran	706.399.893,00	1 tahun anggaran	706.399.893,00	1 tahun anggaran	727.591.889,79	1 tahun anggaran	741.543.445,09	1 tahun anggaran	741.543.445,09		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.865.373,00	11 laporan	371.401.403,00	11 laporan	271.401.403,00	11 laporan	271.401.403,00	11 laporan	279.543.445,09	11 laporan	279.543.445,09	11 laporan	279.543.445,09		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.034.998.490,00	1 tahun anggaran	1.034.998.490,00	1 tahun anggaran	34.998.490,00	1 tahun anggaran	34.998.490,00	1 tahun anggaran	36.048.444,70	1 tahun anggaran	50.000.000,00	1 tahun anggaran	50.000.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	758.405.731,00	4 Laporan	746.176.841,00	4 Laporan	400.000.000,00	4 Laporan	400.000.000,00	4 Laporan	412.000.000,00	4 Laporan	412.000.000,00	4 Laporan	412.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Perunungan Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunungan Urusan Pemerintah Daerah	1.851.035.349,00	1 tahun anggaran	1.822.950.804,00	1 tahun anggaran	850.000.000,00	1 tahun anggaran	851.500.000,00	1 tahun anggaran	877.045.000,00	1 tahun anggaran	1.394.881.985,00	1 tahun anggaran	1.394.881.985,00		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	647.600.001,00	2 KBM	647.600.001,00	2 KBM	-	2 KBM	-	2 KBM	-	2 KBM	563.232.896,00	2 KBM	563.232.896,00		
Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	-	1 unit	7.000.000,00	2 KBM	50.000.000,00	2 KBM	51.500.000,00	2 KBM	53.045.000,00	2 KBM	7.649.089,00	2 KBM	7.649.089,00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.203.435.348,00	11 paket	1.168.350.803,00	11 paket	800.000.000,00	11 paket	800.000.000,00	11 paket	824.000.000,00	11 paket	824.000.000,00	11 paket	824.000.000,00		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.071.345.595,00	1 tahun anggaran	4.120.560.033,00	1 tahun anggaran	2.126.581.484,69	1 tahun anggaran	2.356.549.704,25	1 tahun anggaran	2.382.679.983,78	1 tahun anggaran	2.462.847.818,38	1 tahun anggaran	2.462.847.818,38		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.897.417,00	11 Laporan	9.946.523,00	11 Laporan	110.244.918,69	11 Laporan	113.552.266,25	11 Laporan	116.958.834,24	11 Laporan	160.868.834,24	11 Laporan	160.868.834,24		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.210.375.000,00	11 laporan	1.259.035.000,00	11 laporan	1.000.000.000,00	11 laporan	1.000.000.000,00	11 laporan	1.030.000.000,00	11 laporan	1.030.000.000,00	11 laporan	1.030.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.237.459,00	11 laporan	16.336.566,00	11 laporan	16.336.566,00	11 laporan	26.336.566,00	11 laporan	27.126.662,98	11 laporan	27.126.662,98	11 laporan	27.126.662,98		
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	2.843.835.719,00	11 laporan	2.835.241.944,00	11 laporan	1.000.000.000,00	11 laporan	1.216.660.872,00	11 laporan	1.208.594.486,56	11 laporan	1.244.852.321,16	11 laporan	1.244.852.321,16		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.279.207.092,00	1 tahun anggaran	5.226.902.936,00	1 tahun anggaran	2.075.058.914,00	1 tahun anggaran	2.674.695.116,60	1 tahun anggaran	2.754.935.970,10	1 tahun anggaran	2.990.137.370,53	1 tahun anggaran	2.990.137.370,53		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perekangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perekangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.853.220,00	1 tahun anggaran	193.514.220,00	1 tahun anggaran	166.853.220,00	1 tahun anggaran	171.858.816,60	1 tahun anggaran	177.014.581,10	1 tahun anggaran	177.014.581,10	1 tahun anggaran	177.014.581,10		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	1.319.171.603,00	1 tahun anggaran	1.420.636.302,00	1 tahun anggaran	1.453.995.694,00	1 tahun anggaran	1.750.000.000,00	1 tahun anggaran	1.802.500.000,00	1 tahun anggaran	1.883.032.789,43	1 tahun anggaran	1.883.032.789,43		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.946.850,00	1 tahun anggaran	136.094.603,00	1 tahun anggaran	100.000.000,00	1 tahun anggaran	103.000.000,00	1 tahun anggaran	106.090.000,00	1 tahun anggaran	106.090.000,00	1 tahun anggaran	106.090.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.707.235.419,00	1 tahun anggaran	3.476.657.811,00	1 tahun anggaran	354.210.000,00	1 tahun anggaran	649.836.300,00	1 tahun anggaran	669.331.389,00	1 tahun anggaran	824.000.000,00	1 tahun anggaran	824.000.000,00		

Sejak Awal Tahun 2020 Dunia di perhadapkan dengan kondisi Pandemic COVID-19 , sementara di Provinsi Sulawesi Utara sudah ada masyarakat yang terdampak Virus Covid -19 . Hal ini sangat memberikan rasa kekawatiran dari masyarakat untuk beraktifitas, sehingga berdampak pada kelesuhan aktifitas ekonomi di daerah. Banyak terjadi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, aktifitas perdagangan mulai terdampak, disisi lain Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan pembiayaan dalam rangka menanggulangi Wabah Nasional.

Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2020 tentang PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA yang berisikan beberapa hal yaitu :

- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu mensinergikan dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan u paya penanggulangan;

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Program vaksinasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan pada tahun 2021.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;

3. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
4. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
- c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
- d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;
- e) Sosialisasi dan *Public Relationship*, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
- f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan

- tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
  - h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
  - i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penanggulangan yang difokuskan kepada Pembelian APD, peralatan medis di Rumah Sakit dan Pusat penanganan COVID-19. Untuk menyediakan Dana tersebut maka dilakukan **REFOCUSING ANGGARAN DI PERANGKAT DAERAH**, hal ini oleh Perangkat Daerah meminimalisir kegiatan-kegiatan untuk di refocusing pada Tahun Anggaran Perubahan 2021.

Untuk Tahun Anggaran 2023 menghadapi dilema ini dimana terjadi peningkatan target penerimaan pendapatan daerah yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 4.094.407.075.591.- dari Tahun 2021 sebesar Rp. 4.072.305.543.344.- seperti dalam **Tabel 5.1. Rancangan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023** di bawah ini.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk menurunkan jumlah Belanja Daerah berdasarkan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 yaitu penanganan COVID-19 pada setiap Perangkat Daerah. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 Bapenda sebesar Rp. 74.838.089.411,24.- (lebih kecil besaran Pagu Belanja Tahun 2021 Induk). Dengan demikian maka untuk perencanaan Program dan Kegiatan

Bapenda telah dilakukan Pemutahiran Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (sebelumnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ,

Selanjutnya untuk Penganggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023, BAPENDA mengalokasikan dana secara proporsional untuk membiayai 2 program untuk Kantor Pusat dan 10 UPTD PPD, program penunjang pemerintahan daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah seperti tergambar pada **Tabel 5.2** Pagu Anggaran Tahun 2023.

Pagu Anggaran untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 74.838.089.411,24,- yang terdiri dari Anggaran untuk program penunjang pemerintahan daerah sebesar Rp. 62.116.075.869,25,- dan program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 12.722.013.542,- (lebih kecil dari anggaran tahun 2021 yaitu Rp. 20.000.000.000).-

Di harapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengikuti pedoman SIPD Tahun 2023 dapat menjadi input terhadap pencapaian indicator kinerja utama Bapenda sekaligus menjadi dorongan dalam pencapaian target penerimaan PAD di Tahun 2023.

**Tabel 5.1.**  
**Rancangan Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026**

	Uraian Rincian Per Objek	Tahun				Tahun				Tahun				Tahun			
		2021	2023	Kenaikan	%	2023	Kenaikan	%	2024	Kenaikan	%	2025	Kenaikan	%	2026	Kenaikan	%
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.072.305.545.344</b>	<b>4.072.073.317.072</b>	(232.228.272)	(0,01)	<b>4.094.407.075.591</b>	<b>22.333.758.519</b>	<b>0,55</b>	<b>4.119.289.559.636</b>	<b>24.882.484.045</b>	<b>0,61</b>	<b>4.147.876.703.057</b>	<b>28.587.143.421</b>	<b>0,69</b>	<b>4.177.397.388.639</b>	<b>29.520.685.583</b>	<b>0,71</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.413.292.261.344</b>	<b>1.433.060.033.072</b>	<b>19.767.771.728</b>	<b>1,40</b>	<b>1.455.393.791.591</b>	<b>22.333.758.519</b>	<b>1,56</b>	<b>1.480.276.275.636</b>	<b>24.882.484.045</b>	<b>1,71</b>	<b>1.508.863.419.057</b>	<b>28.587.143.421</b>	<b>1,93</b>	<b>1.538.384.104.639</b>	<b>29.520.685.583</b>	<b>1,96</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>1.123.928.911.759</b>	<b>1.135.943.855.914</b>	<b>12.014.944.155</b>	<b>1,07</b>	<b>1.149.962.344.088</b>	<b>14.018.488.174</b>	<b>1,23</b>	<b>1.166.051.304.246</b>	<b>16.088.960.158</b>	<b>1,40</b>	<b>1.185.509.000.477</b>	<b>19.457.696.231</b>	<b>1,67</b>	<b>1.205.551.132.829</b>	<b>20.042.132.352</b>	<b>1,69</b>
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	385.716.725.146	389.573.892.396	3.857.167.250	1,00	393.469.631.320	3.895.738.924	1,00	397.404.327.634	3.934.696.313	1,00	401.378.370.911	3.974.043.277	1,00	405.392.154.620	4.013.783.709	1,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	313.081.988.517	313.081.988.517	-	-	313.081.988.517	-	-	314.647.398.460	1.565.409.943	0,50	317.793.872.444	3.146.473.985	1,00	320.971.811.169	3.177.938.724	1,00
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	252.963.600.000	252.963.600.000	-	-	254.228.418.000	1.264.818.000	0,50	255.499.560.090	1.271.142.090	0,50	258.054.555.691	2.554.995.601	1,00	260.635.101.248	2.580.545.557	1,00
	Pajak Air Permuakaan (PAP)	3.500.000.000	3.517.500.000	17.500.000	0,50	3.535.087.500	17.587.500	0,50	3.570.438.375	35.350.875	1,00	3.606.142.759	35.704.384	1,00	3.642.204.186	36.061.428	1,00
	Pajak Rokok (PR)	168.666.598.096	176.806.875.000	8.140.276.904	4,83	185.647.218.750	8.840.343.750	5,00	194.929.579.688	9.282.360.938	5,00	204.676.058.672	9.746.478.984	5,00	214.909.861.606	10.233.802.934	5,00
	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>16.850.495.000</b>	<b>199.100.042.850</b>	<b>182.249.547.850</b>	<b>1.081,57</b>	<b>206.896.697.401</b>	<b>7.796.654.551</b>	<b>3,92</b>	<b>215.003.375.713</b>	<b>8.106.678.312</b>	<b>3,92</b>	<b>223.432.473.169</b>	<b>8.429.097.456</b>	<b>3,92</b>	<b>232.196.882.748</b>	<b>8.764.409.579</b>	<b>3,92</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>8.875.415.000</b>	<b>190.882.117.450</b>	<b>182.006.702.450</b>	<b>2.050,68</b>	<b>198.425.391.374</b>	<b>7.543.273.924</b>	<b>3,95</b>	<b>206.267.659.931</b>	<b>7.842.268.557</b>	<b>3,95</b>	<b>214.420.800.817</b>	<b>8.153.140.886</b>	<b>3,95</b>	<b>222.897.164.374</b>	<b>8.476.363.557</b>	<b>3,95</b>
01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.855.415.000	190.862.117.450	182.006.702.450	2.055,32	198.405.391.374	7.543.273.924	3,95	206.247.659.931	7.842.268.557	3,95	214.400.800.817	8.153.140.886	3,95	222.877.164.374	8.476.363.557	3,95
12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>6.300.080.000</b>	<b>6.459.175.400</b>	<b>159.095.400</b>	<b>2,53</b>	<b>6.624.618.527</b>	<b>165.443.127</b>	<b>2,56</b>	<b>6.796.693.907</b>	<b>172.075.380</b>	<b>2,60</b>	<b>6.975.699.384</b>	<b>179.005.477</b>	<b>2,63</b>	<b>7.161.946.757</b>	<b>186.247.373</b>	<b>2,67</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.054.080.000	2.064.350.400	10.270.400	0,50	2.074.672.152	10.321.752	0,50	2.085.045.513	10.373.361	0,50	2.095.470.740	10.425.228	0,50	2.105.948.094	10.477.354	0,50
04	Retribusi Terminal	500.000.000	525.000.000	25.000.000	5,00	551.250.000	26.250.000	5,00	578.812.500	27.562.500	5,00	607.753.125	28.940.625	5,00	638.140.781	30.387.656	5,00
08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.416.000.000	1.486.800.000	70.800.000	5,00	1.561.140.000	74.340.000	5,00	1.639.197.000	78.057.000	5,00	1.721.156.850	81.959.850	5,00	1.807.214.693	86.057.843	5,00
09	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	1.655.000.000	1.704.650.000	49.650.000	3,00	1.755.789.500	51.139.500	3,00	1.808.463.185	52.673.685	3,00	1.862.717.081	54.253.896	3,00	1.918.598.593	55.881.512	3,00

11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	675.000.000	678.375.000	3.375.000	0,50	681.766.875	3.391.875	0,50	685.175.709	3.408.834	0,50	688.601.588	3.425.879	0,50	692.044.596	3.443.008	0,50
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>1.758.750.000</b>	<b>83.750.000</b>	<b>5,00</b>	<b>1.846.687.500</b>	<b>87.937.500</b>	<b>5,00</b>	<b>1.939.021.875</b>	<b>92.334.375</b>	<b>5,00</b>	<b>2.035.972.969</b>	<b>96.951.094</b>	<b>5,00</b>	<b>2.137.771.617</b>	<b>101.798.648</b>	<b>5,00</b>
03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	150.000.000	157.500.000	7.500.000	5,00	165.375.000	7.875.000	5,00	173.643.750	8.268.750	5,00	182.325.938	8.682.188	5,00	191.442.234	9.116.297	5,00
04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.225.000.000	1.286.250.000	61.250.000	5,00	1.350.562.500	64.312.500	5,00	1.418.090.625	67.528.125	5,00	1.488.995.156	70.904.531	5,00	1.563.444.914	74.449.758	5,00
06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000	315.000.000	15.000.000	5,00	330.750.000	15.750.000	5,00	347.287.500	16.537.500	5,00	364.651.875	17.364.375	5,00	382.884.469	18.232.594	5,00
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>50.838.250.000</b>	<b>50.838.250.000</b>	-	-	<b>50.838.250.000</b>	-	-	<b>50.838.250.000</b>	-	-	<b>50.838.250.000</b>	-	-	<b>50.838.250.000</b>	-	-
	Bgn Laba yg Dibagikan kpd Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal BUMD	50.838.250.000	50.838.250.000	-	-	50.838.250.000	-	-	50.838.250.000	-	-	50.838.250.000	-	-	50.838.250.000	-	-
	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>221.674.604.585</b>	<b>47.177.884.308</b>	<b>(174.496.720.277)</b>	<b>(78,72)</b>	<b>47.696.500.103</b>	<b>518.615.795</b>	<b>1,10</b>	<b>48.383.345.677</b>	<b>686.845.574</b>	<b>1,44</b>	<b>49.083.695.410</b>	<b>700.349.734</b>	<b>1,45</b>	<b>49.797.839.063</b>	<b>714.143.652</b>	<b>1,45</b>
	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-
	Hasil Kerja Sama Daerah	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000	-	-
	Jasa Giro	2.670.780.000	2.724.195.600	53.415.600	2,00	2.778.679.512	54.483.912	2,00	2.862.039.897	83.360.385	3,00	2.947.901.094	85.861.197	3,00	3.036.338.127	88.437.033	3,00
	Pendapatan Bunga	26.095.864.585	26.226.343.908	130.479.323	0,50	26.619.739.067	393.395.159	1,50	27.152.133.848	532.394.781	2,00	27.695.176.525	543.042.677	2,00	28.249.080.055	553.903.530	2,00
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.076.960.000	14.147.344.800	70.384.800	0,50	14.218.081.524	70.736.724	0,50	14.289.171.932	71.090.408	0,50	14.360.617.791	71.445.860	0,50	14.432.420.880	71.803.089	0,50
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	174.751.000.000	-	(174.751.000.000)	(100,00)	-	#DIV/0!	-									
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.639.013.284.000</b>	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-

<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.639.013.284.000</b>	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-	<b>2.639.013.284.000</b>	-	-
Dana Perimbangan	2.585.484.063.000	2.585.484.063.000	-	-	2.585.484.063.000	-	-	2.585.484.063.000	-	-	2.585.484.063.000	-	-	2.585.484.063.000	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	53.529.221.000	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000	-	-	53.529.221.000	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>(20.000.000.000)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>(20.000.000.000)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	20.000.000.000	-	(20.000.000.000)	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel.5.2. PAGU ANGGARAN BAPENDA PROV. SULUT TAHUN 2023**

NO	KP/ UPTD	PAGU
1.	KANTOR PUSAT	60.342.940.849,25
2.	MANADO	2.809.968.303,00
3.	MINAHASA	1.266.405.187,00
4.	MINAHASA UTARA	1.319.674.998,00
5.	MINAHASA TENGGARA	869.374.006,00
6.	BITUNG	1.189.862.239,00
7.	MINAHASA SEATAN	1.290.596.648,00
8.	S T S	1.373.678.339,00
9.	TOMOHON	1.071.599.664,00
10.	KOTAMOBAGU, BOLSEL	1.677.797.673,00
11.	BOLAANG MONGONDOW, BOLMUT DAN BOLTIM	1.626.191.505,00
<b>J U M L A H</b>		<b>74.838.089.411,25</b>

Demikian juga dengan rencana Pembentukan UPTD-PPD yang baru di wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bolmong Timur, Bolmong Selatan , Talaud dan Sitaro, diharapkan dapat memberikan dorongan dalam pencapaian pengelolaan pendapatan di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. Adapun pertimbangan dalam pembentukan 5 UPTD-PPD/SAMSAT adalah :

1. Pembentukan POLRES yang baru di 4 Kabupaten : Bolanng Mongnow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kepulauan Sitaro. Untuk Kepulauan Talaud sudah ada unit Polresta ;
2. Regiden Kendaraan Bermotor berdasarkan wilayah kepolisian;
3. Mempekecil luas wilayah pelayanan, atau meninkatkan aksesibilitas pelayanan sampai ke Kecamatan/Desa/Kelurahan.
4. Perbedaan banyaknya Jumlah Kendaraan Bermotor di setiap wilayah
5. Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
6. Mempermudah Pengministrasian Pajak Daerah
7. Mendapat dukungan rekomendasi dari Bupati untuk pembentukan 5 UPTD dan Samsat.

Kebutuhan pembentukan UPTD-PPD/SAMSAT yang Baru untuk menunjang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap Wilayah Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BADAN PENDAPATAN DAERAH Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang berpedoman Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Sulawesi Utara dalam **“Mewujudkan Sulawesi Utara yang Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.”**

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang selanjutnya akan menjadi usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 yang dilakukan berdasarkan aspek Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan program prioritas Nasional.

Manado, Maret 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**OLVIE ATTENG, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19621010 198603 2 02**